

**STRATEGI DAN TAKTIK NEGOSIASI ANTARA
PEMERINTAH THAILAND DAN BARISAN REVOLUSI NASIONAL
DALAM UPAYA MEREDAM KONFLIK TAHUN 2013-2018**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

SHELY FRESLYANA

14323103

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA**

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2021

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat Guna Memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh :

SHELY FRESLYANA

14323103

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2021

HALAMAN PENGESAHAN

**Strategi Dan Taktik Negosiasi Antara Pemerintah Thailand Dan Barisan
Revolusi Nasional Dalam Upaya Meredam Konflik Tahun 2013-2018**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-syarat Guna Memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal



Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi


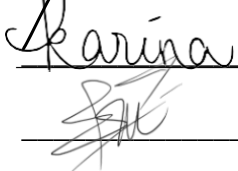

Hangga Fathana, S.IP., B.Int St.,M.A.



Dewan Penguji

1. Hangga Fathana, S.IP., B.Int St.,M.A.
2. Karina Utami Dewi, S.IP., M.A
3. Enggar Furi Herdianto, S.IP.,M.A

Tanda Tangan

PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK

PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Shely Freslyana

NIM : 14323103

Program studi : Hubungan Internasional

Judul Skripsi : Strategi Dan Taktik Negosiasi Antara Pemerintah Thailand Dan Barisan Revolusi Nasional Dalam Upaya Meredam Konflik Tahun 2013-2018

Melalui surat ini, saya menyatakan bahwa :

1. Selama melakukan penelitian dan pembuatan laporan penelitian skripsi, saya tidak melakukan etika pelanggaran akademik dalam bentuk apapun, seperti penjiplakan, pembuatan skripsi oleh orang lain atau pelanggaran lain yang bertentangan dengan etika akademik yang dijunjung tinggi Universitas Islam Indonesia. Karena itu, skripsi yang saya buat merupakan karya ilmiah saya sendiri, bukan jiplakan atau karya orang lain.
2. Apabila dalam ujian skripsi saya terbukti melanggar etika akademik, maka saya siap menerima sanksi sebagaimana aturan yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.
3. Apabila dikemudian hari, setelah saya lulus dari Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia ditemukan bukti secara meyakinkan bahwa skripsi ini adalah karya jiplakan atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang ditetapkan oleh Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 26 Juli 2021

Yang menyatakan



Shely Freslyana

HALAMAN MOTO

“The past can’t hurt you anymore, not unless you let it.”

-Alan Moore

“When we are tired, we are attacked by ideas we conquered long ago.”

-Friedrich Nietzsche



PRAKATA

Segala puji dan syukur di panjatkan untuk Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala nikmat dan karunia-Nya yang turut serta memberikan kelancaran maupun kemudahan untuk menyelesaikan penelitian ini. Tak lupa pula peneliti mengucapkan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Hangga Fathana, S.IP., B. Int.ST., M.A selaku Ketua Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia. Dan selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa mencurahkan segenap ilmu, waktu, dan tenaga untuk memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi kepada saya.
2. Ibu Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A. selaku Dosen Penasihat Akademik yang senantiasa memberikan dorongan semangat kepada penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Mohon maaf sebesar-besarnya atas kesalahan yang pernah saya buat terhadap ibu.
3. Seluruh dosen Program Studi Hubungan Internasional serta civitas akademika Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia atas setiap ilmu yang diberikan kepada peneliti selama menempuh masa perkuliahan sampai saat ini.
4. Kedua orangtua saya ibunda Sujiati dan ayahanda Ahmad Sajidin, kakak dan adik saya tercinta Alin Fauzi, Kristi Mulyani dan Farhan Januar Alfaridho, yang telah memberikan doa, cinta, kasih sayang, dan motivasi yang tidak ada henti- hentinya.

5. Terima kasih kepada mas Pandu Adi Buono yang tidak pernah lelah memberikan semangat dan dukunganya kepada saya untuk melalui proses yang panjang ini.
6. Terima kasih kepada Rizqya Nafiatin, Ika Sari Rahmawati, dan Wulan Suci Ramadhani yang telah menjadi sahabat terbaik, selalu memberikan suport, dan masukan yang membangun.
7. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan di penghujung waktu ini; Ungky Nolat Kurnia, Adelia Rahmawati, Qodri Khoirina, Desy Fatmasari, Alfiah Noor. Kalian keren dan hebat, perjalanan selanjutnya tetaplah penuh semangat.
8. Terima kasih kepada hewan kesayanganku yaitu Prince, Brown, dan Amber yang sudah menemani hari-hariku.

DAFTAR SINGKATAN

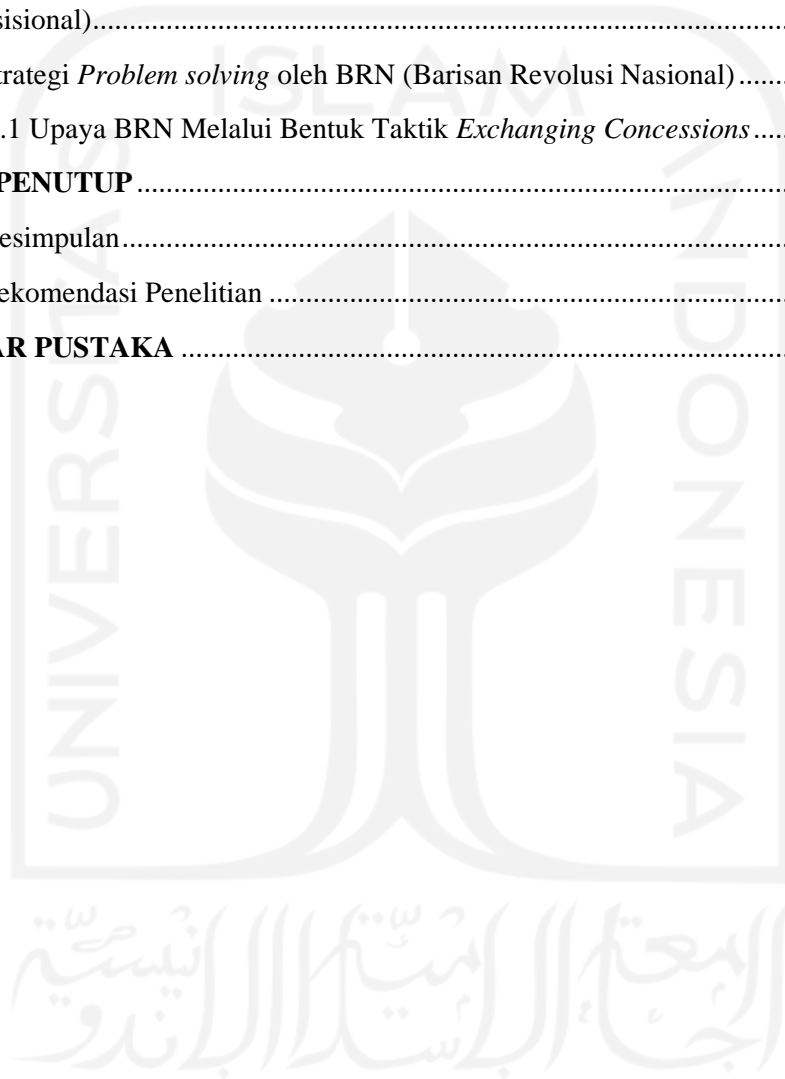
BRN	: Barisan Revolusi Nasional
GEMPAR	: Gerakan Melayu Pattani Raya
GMIP	: Gerakan Mujahideen Islam Pattani
PULO	: Pattani United Liberation Organisation
MARA Pattani	: Majelis Syura Pattani
NIAC	: Non International Armed Conflict
RULAC	: The Rule of Law in Armed Conflicts



DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK	ii
HALAMAN MOTO	iii
PRAKATA	iv
DAFTAR SINGKATAN	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
ABSTRAK	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Signifikansi	6
1.5 Cakupan Penelitian	7
1.6 Tinjauan Pustaka	9
1.7 Perspektif (Teori/Konsep)	12
1.8 Metode Penelitian	19
1.8.1 Jenis Penelitian	19
1.8.2 Subjek Penelitian	19
1.8.3 Alat Pengumpul Data	20
1.8.4 Proses Penelitian	20
BAB 2 STRATEGI CONTENTING DAN PROBLEM SOLVING OLEH PEMERINTAH THAILAND	21
2.1 Strategi <i>Contending</i> oleh Pemerintah Thailand	21
2.1.1 Upaya Pemerintah Thailand Melalui Bentuk Taktik <i>Threats</i> (Ancaman)	23
2.1.2 Upaya Militer Thailand Melalui Bentuk Taktik <i>Harrasment</i> (Pelecehan)	26
2.1.3 Upaya Militer Thailand Melalui Taktik <i>Positional Commitments</i> (Komitmen posisional)	30
2.2 Strategi <i>Problem Solving</i> Militer Thailand	31

2.2.1 Upaya Militer Melalui Bentuk Taktik <i>Exchanging Concessions</i>	32
BAB 3 STRATEGI CONTENDING DAN PROBLEM SOLVING OLEH BARISAN REVOLUSI NASIONAL (BRN)	39
3.1 Strategi <i>Contending</i> BRN (Barisan Revolusi Nasional)	39
3.1.1 Upaya BRN Melalui Bentuk Taktik <i>Threats</i> (Ancaman)	39
3.1.2 Upaya BRN Melalui Bentuk Taktik <i>Harassment</i> (Pelecehan)	41
3.1.3 Upaya BRN Melalui Bentuk Taktik <i>Positional commitments</i> (Komitmen posisional)	45
3.2 Strategi <i>Problem solving</i> oleh BRN (Barisan Revolusi Nasional)	48
3.2.1 Upaya BRN Melalui Bentuk Taktik <i>Exchanging Concessions</i>	49
BAB 4 PENUTUP	52
4.1 Kesimpulan	52
4.2 Rekomendasi Penelitian	56
DAFTAR PUSTAKA	58



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Aplikasi Strategies and Tactic In Negotiation dalam bentuk Contending dan Problem Solving oleh Pemerintah Thailand 37

Tabel 3. 1 Sikap Harrasment yang dilakukan BRN (Barisan Revolusi Nasional) 44

Tabel 3. 2 Aplikasi Teori Strategies and Tactic in Negotiation dalam bentuk Contending dan Problem Solving oleh BRN 50



ABSTRAK

Thailand merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah. Meskipun demikian, Thailand tidak luput dari konflik internal di dalam wilayahnya. Konflik yang terjadi ialah antara militer Thailand dan BRN (Barisan Revolusi Nasional) sebuah kelompok pemberontak yang berjuang untuk memperoleh kemerdekaan. Kedua belah pihak saling menggunakan pendekatan kekerasan, yang mengakibatkan banyak korban berjatuhan. Upaya dialog damai mulai dilakukan kedua belah pihak di tahun 2013 di Kuala Lumpur, walaupun mencapai kesepakatan namun gagal karena kurangnya komitmen di kedua belah pihak. Dalam penelitian ini penulis menggunakan *Strategies and Tactics in Negotiation* dengan bentuk strategi *Problem Solving* dan *Contending* dalam melihat strategi negosiasi yang dilakukan pemerintah Thailand dan BRN. Penelitian ini akan menjawab bagaimana strategi dan taktik negosiasi antara Pemerintah Thailand dan BRN (Barisan Revolusi Nasional) dalam upaya meredam konflik tahun 2013-2018.

Kata kunci: *Pemerintah Thailand, Barisan Revolusi Nasional, Konflik, Strategi dan taktik negosiasi, Contending, Problem Solving*

ABSTRACT

Thailand is one of the countries in Southeast Asia that was never colonized. Nevertheless, Thailand did not escape from internal conflicts within its territory. The conflict that occurred was between the Thai military and the BRN (Barisan Revolusi Nasional) a rebel group fighting for independence. Both sides used a violent approach to each other, resulting in many casualties. Efforts for a peaceful dialogue began to be carried out by both parties in 2013 in Kuala Lumpur, although an agreement was reached but failed due to a lack of commitment on both sides. In this study, the author uses *Strategies and Tactics in Negotiation* in the form of *Problem Solving* and *Contending* strategies in looking at the negotiation strategies carried out by the Thai government and BRN. This research will answer how the strategy and tactics of negotiation between the Thai Government and the BRN (Barisan Revolusi Nasional) in an effort to reduce the conflict in 2013-2018.

Keywords: *Thai Government, BRN, Conflict, Negotiation strategies and tactics, Contending, Problem Solving*

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Thailand merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah. Meskipun demikian, Thailand tidak luput dari permasalahan konflik di dalam wilayahnya. Konflik yang terjadi ialah konflik antara militer Thailand dengan kelompok separatis muslim di wilayah Thailand Selatan. Jika dilihat dari perspektif historis, tahun 1902 wilayah Patani yang sebelumnya merupakan kerajaan melayu diambil alih oleh kerajaan Thai. Pada tahun 1938, Phibul Songkhram, seorang Jenderal Militer melakukan kebijakan asimilasi (penggabungan budaya) yang bertujuan untuk menghilangkan dan menggantikan identitas agama dan kultur orang muslim Melayu di Thailand Selatan dengan identitas kultur Thai yang berdasarkan Budhisme (Wulandari, 2018, p. 48).

Kebijakan asimilasi yang diterapkan oleh pemerintah Thailand ini tidak hanya telah menciptakan kesenjangan agama dan budaya tetapi juga berdampak pada kesenjangan politik dan ekonomi. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Thailand terhadap masyarakat Thailand Selatan menimbulkan kecemburuan sosial karena pemerintah Thailand lebih mengutamakan masyarakat Thai daripada muslim melayu. Kelompok muslim di Thailand Selatan tidak diperlakukan secara adil dengan sistem pembangunan ekonomi, ketidaksetaraan politik dan geografi yang mengarah kepada diskriminasi etnis, dan segregasi rasial (Aurel Croissant, pp. 23-24).

Benturan-benturan tersebut disebabkan karena hubungan yang asimetris antara kelompok mayoritas dan kelompok minoritas. Sebagai akibat dari kekecewaan terhadap pemerintah hal tersebut menyebabkan meletusnya berbagai perlawanan dengan kekerasan dan memicu pembentukan milisi atau gerakan pemberontakan dan pembebasan wilayah muslim Thailand Selatan seperti, GEMPAR (*Gerakan Melayu Pattani Raya*), GMIP (*Gerakan Mujahideen Islam Patani*), BRN (*Barisan Revolusi Nasional*), PULO (*Pattani United Liberation Organisation*) (Pitsuwan, 1989, hal. 212). kehadiran mereka untuk menuntut kemerdekaan dan berusaha melepaskan diri dari wilayah dan pemerintah Thailand (Melvin, 2007, hal. 2).

BRN (*Barisan Revolusi Nasional*) merupakan satu dari beberapa kelompok yang mendominasi aksi kekerasan dilapangan, mereka mengontrol hampir semua pemberontak di Ujung Selatan (Middle East Institute , 2017). Menurut Helbardt, BRN kemungkinan besar adalah pencipta utama kekerasan sebelum dan sesudah pembantaian militer Thailand tahun 2004 terhadap Muslim Melayu di Tak Bai dan Kru Ze. Mereka juga diklaim menjadi penyebab atas berbagai serangan dan bertanggung jawab atas insiden-insiden besar yang terjadi diwilayah Selatan (Helbardt, 2015, pp. 203-204).

Pada tahun 2013 pada masa pemerintahan Yingluck Shinawatra, pendekatan dialog mulai dilakukan dalam menuju upaya resolusi konflik dengan kontribusi Malaysia sebagai fasilitator. Ini untuk pertama kali dalam sejarah, negara Thailand secara resmi mengadakan pembicaraan damai dengan pemberontak di Ujung Selatan, yang telah berjuang untuk kemerdekaan sejak

1960-an. Pada 28 Februari 2013, Tim negosiasi besar dari pihak Thailand dibentuk dan dialog damai antara BRN dan pemerintah yang digelar di Kuala Lumpur Malaysia (Mayberry, 2013). BRN menjadi aktor penting di setiap perundingan, karena BRN menjadi salah satu gerakan yang paling aktif dan kuat mewakili kelompok separatis yang lain, BRN juga memiliki organisasi yang luas dan menjadi pemimpin pemberontakan di Ujung Selatan (Helbardt, 2015, pp. 203-204).

Namun, upaya dialog tersebut tampak ada sedikit keraguan setelah kedua belah pihak tidak mematuhi kesepakatan untuk mengurangi kekerasan selama 40 hari dari awal Ramadan 2013, yang dikenali dengan Inisiatif Damai Ramadhan (*Ramadhan Peace Initiative*). Dalam kesepakatan tersebut masing-masing pihak baik para pejuang bersenjata pembebasan Patani (BRN) dan tentara Thailand harus menahan diri dengan mengurangi tindak kekerasan. Menanggapi hasrat baik tersebut, BRN menyambut dengan menyatakan, mereka tidak hanya akan mengurangi kekerasan bahkan akan berhenti selama bulan Ramadan. Tentu saja dengan syarat, tentara pemerintah harus ditarik balik ke kamp. Selama tempo tersebut tentara Thailand tidak boleh lagi berkeliaran di tengah-tengah masyarakat Melayu di wilayah Thailand Selatan. Namun dalam minggu pertama saja aparat keamanan sudah menembak mati beberapa pemuda aktivis perjuangan. Karena tidak tahan diserang sepihak, akhirnya pejuang bersenjata membalas dengan menyerang anggota keamanan Thailand. Inisiatif Damai Ramadan pun bubar dengan masing-masing pihak saling menyalahkan (Ahram, 2016).

Setelah proses dialog mengalami kegagalan, BRN kembali melancarkan kekerasan. Pada 31 Juli 2013, sebuah kelompok separatis bersenjata meledakkan bom di sebuah sekolah di provinsi Yala, melukai seorang sukarelawan keamanan (Post, Five injured in four attacks in Yala, 2013). Kemudian disusul insiden pemboman, bom tersebut ditanam di belakang bilik penjaga di sebuah sekolah di provinsi Yala menewaskan dua tentara dan melukai seorang bocah sekolah berusia 12 tahun pada 10 September 2013 (Post, BRN rebels blamed for Yala school bomb, 2013).

Pada tanggal 22 Mei 2014, Yingluck Shinawatra mengalami kudeta karena krisis politik di Thailand dan dianggap tidak ada perubahan signifikan terhadap upaya penyelesaian konflik di Thailand selatan (BBC, Kudeta Militer di Thailand, 2014). Sehingga tampuk pemerintahan saat itu digantikan oleh Junta Militer Prayuth Chan-Ocha. Selama pemerintahnya, tindakan kekerasan masih terus terjadi, sehingga kebijakan dan pendekatan terus diupayakan hingga sekarang ini, berharap pintu perundingan akan dibuka kembali setelah perundingan tahun 2013 lalu yang gagal (BBC, Eksklusif: Pemberontak Muslim utama Thailand Selatan Siap berunding, 2017).

Desember 2014, Perdana Menteri Thailand Jenderal Prayut Chan-Ocha melanjutkan dialog perdamaian yang difasilitasi Kuala Lumpur. Komposisi partai-partai dialog telah berubah secara signifikan di kedua sisi. Militer telah mengambil kursi pengemudi dalam tim dialog pemerintah Thailand, Sementara pihak pemberontak telah membentuk organisasi bernama MARA Patani yaitu organisasi yang memayungi beberapa kelompok pemberontak seperti BRN,

PULO, dan GMIP untuk menjadi satu kesatuan dengan tujuan yang sama yaitu untuk berpartisipasi dalam pembicaraan damai, tetapi juga untuk mendapatkan pengakuan dan dukungan internasional untuk hak penentuan nasib sendiri (Chalermripinyorat, 2018). Namun sebagian kelompok BRN yang lain menolak untuk ambil bagian dalam pembicaraan, karena menganggap dialog yang sebelumnya belum selesai, mengapa harus ada proses baru. Bagi BRN penciptaan proses yang baru setelah tahun 2013 sudah menyalahi dasar yang sudah disetujui sebelumnya (Siregar, 2017).

Walaupun ketidakikutsertaan BRN dalam meja perundingan, pemerintah Thailand tetap melanjutkan upaya dialog dengan MARA Patani sebagai lanjutan dialog yang sebelumnya sempat gagal di tahun 2013. Selama dialog kedua belah pihak yakni perwakilan Thailand yang dipimpin Jenderal Aksara Khrphol dan MARA Patani menyepakati adanya "*Safety zona*" di tahun 2016 di beberapa area yang telah ditentukan. Zona aman ini dibentuk untuk memastikan adanya gencatan senjata di wilayah yang telah ditentukan. Namun hingga 2018 kredibilitas keduanya dipertanyakan mengingat tidak ada perubahan yang signifikan. Insiden kekerasan masih saja terjadi. Hal ini disebabkan karena MARA Patani tidak memiliki peran yang kuat terutama untuk mengontrol militan yang ada di lapangan.

Beberapa upaya dialog telah dilakukan oleh pemerintah Thailand dan BRN, tetapi sejauh ini dialog selalu mengalami kebuntuan bahkan gagal, tidak ada hasil nyata kesepakatan yang memberikan kepuasan bagi kedua belah pihak. Insiden kekerasan pun masih sering terjadi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka tulisan ini akan mencoba menjawab pertanyaan terkait **Bagaimana strategi dan taktik negosiasi antara Pemerintah Thailand dan BRN (Barisan Revolusi Nasional) dalam upaya meredam konflik tahun 2013-2018?**

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana strategi dan taktik negosiasi yang dilakukan kedua belah pihak antara Pemerintah Thailand dan BRN dalam upaya meredam konflik.
2. Untuk memetakan strategi dan taktik yang dilakukan oleh Pemerintah Thailand dan BRN.

1.4 Signifikansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi serta menambah wawasan ilmu pengetahuan serta ketajaman analisis bagi mahasiswa maupun masyarakat umum terhadap perkembangan ilmu pengetahuan ataupun permasalahan dengan lingkup topik tersebut. Khususnya dalam ilmu Hubungan Internasional di masa mendatang, serta untuk dapat mengetahui bagaimana strategi dan taktik negosiasi antara pemerintah Thailand dan BRN (Barisan Revolusi Nasional), di mana topik ini menjadi isu yang sangat menarik untuk dibahas mengingat durasi konflik yang lama dan sampai sekarang belum menemukan titik temu penyelesaiannya.

Penelitian akan fokus kepada strategi dan taktik yang digunakan masing-masing pihak yaitu pemerintah Thailand dan BRN dengan penggunaan teori yang relevan yaitu *Strategies and Tactics in Negotiation* dilihat dari pendekatan *Contending* dan *Problem Solving* di mana penulis memfokuskan penulisan berdasarkan aktor. Hal tersebut diharapkan akan mempermudah dan dapat memberikan gambaran maupun informasi sejauh mana hubungan ataupun strategi dan taktik yang telah dilakukan antara kedua belah pihak tersebut dalam upaya meredam konflik di Ujung Selatan Thailand.

1.5 Cakupan Penelitian

Dalam skripsi ini, penulis akan membatasi permasalahan yang diangkat, yakni berfokus pada satu organisasi pemberontak muslim di Thailand Selatan yaitu BRN (Barisan Revolusi Nasional). Walaupun sebenarnya di Thailand Selatan banyak organisasi perjuangan rakyat Patani seperti PULO (*Patani United Liberation Organisation*), GMIP (Gerakan Mujahidin Islam Patani). Dalam hal ini penulis memilih BRN (Barisan Revolusi Nasional) karena mereka menjadi kelompok pemberontak paling aktif sejak 2001 hingga saat ini. Berbagai insiden kekerasan yang terjadi di wilayah Selatan kebanyakan dilakukan oleh BRN, Wakil Rektor Universitas Fatoni di Pattani, Dr Ahmad Omar, mengatakan bahwa BRN kelompok gerakan yang memiliki organisasi yang kuat dan terkoordinir dengan baik, mereka juga memiliki militer dilapangan, sehingga merekalah yang dianggap mampu mengendalikan kondisi dilapangan atas insiden-insiden kekerasan yang terjadi.

Menurut *The Rule of Law in Armed Conflicts project (RULAC)* dari Akademi Hukum Humaniter Internasional dan Hak Asasi Manusia Jenewa, menjelaskan bahwa konflik bersenjata non-internasional (NIAC) di Thailand Selatan terjadi antara Pemerintah Thailand dan di sisi lain, Barisan Revolusi Nasional (BRN). Posisi dan peran penting juga terlihat dari upaya dialog damai 2013 di Kuala Lumpur, di mana dialog tersebut fokus terhadap dua aktor yaitu antara pemerintah Thailand dan BRN. Hal ini tentunya mengindikasikan bahwa posisi BRN diakui oleh pemerintah.

Konflik yang terjadi di Thailand Selatan memiliki durasi yang panjang dimulai dari tahun 1960-an ketika mulai muncul kelompok pemberontak melawan pemerintah yang menuntut kemerdekaan bahkan hingga saat ini. Dengan rentang waktu yang cukup panjang itulah penulis akan membatasi penelitian ini bermula sejak 2013, pada masa pemerintahan Yingluck Sinawatra, Thailand untuk pertama kalinya dalam sejarah berinisiatif untuk melakukan dialog damai dengan BRN yang difasilitatori oleh Malaysia. Langkah ini tentunya memberi harapan banyak kepada masyarakat terutama masyarakat Thailand Selatan akan proses perdamaian terkait konflik yang sudah lama terjadi. Walaupun pada akhirnya dialog ini menemui kegagalan akibat kudeta terhadap Yingluck Shinawatra.

Ditahun 2014, ketika kursi perdana menteri Thailand saat itu digantikan oleh Jendral Prayuth Chan-Ocha bahkan hingga saat ini. Jenderal Prayuth juga berjanji akan melanjutkan proses dialog yang sebelumnya sempat terhenti. Ada beberapa upaya yang telah dilakukan Thailand dalam usahanya meredam konflik salah satunya dengan membuka kembali dialog, walaupun aktor perundingan

mengalami perubahan, yaitu dengan MARA Pattani sebuah organisasi yang memayungi beberapa kelompok pemberontak termasuk BRN didalamnya. Selain daripada itu, penulis akan membatasi penelitian hingga 2018 yang bertepatan dengan temuan data yang menunjukkan beberapa upaya yang dilakukan pemerintah Thailand dan BRN dari mulai 2013 hingga 2018 mengalami kebuntuan bahkan kegagalan. Penulis akan menyajikan beberapa kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak selama periode tersebut. Dan melihat bagaimana strategi dan taktik yang dilakukan oleh masing-masing pihak.

1.6 Tinjauan Pustaka

Peneliti akan membuat pembahasan mengenai bagaimana strategi dan taktik negosiasi yang dilakukan oleh militer Thailand dan BRN dalam upaya meredam konflik tahun 2013-2018.

Pembahasan mengenai bagaimana strategi dan taktik negosiasi militer Thailand dan BRN dalam upaya meredam konflik sangat penting mengingat konflik internal ini sudah lama terjadi dan hingga saat ini belum menemukan titik temu penyelesaian. Dalam jurnal yang berjudul *Special Issue: Quagmire of Violence in Thailand's Southern Borderlands* yang ditulis oleh Srisompob Jitpiromsri, Napisa Waitoolkiat & Paul Chambers, menjelaskan bahwa pergantian perdana menteri di Thailand akan mempengaruhi kebijakan yang dibuat. Dan ketika Yingluck Shinatra memenangkan pemilihan besar-besaran ditahun 2011, akan menjadi harapan untuk perubahan kebijakan selatan Thailand. Dan sebuah kemajuan terjadi ketika di tahun 2013 untuk pertama kalinya dalam sejarah Pemerintah Thailand dan BRN (Barisan Revolusi Nasional) sepakat untuk

menandatangani dialog damai sebagai suatu langkah awal membangun rasa saling percaya.

Namun pada awal 2014, dialog itu macet, dilemahkan oleh kekacauan politik di Thailand, faksionalisme di dalam BRN, dan penentangan oleh tentara Thailand. Kudeta militer Thailand Mei 2014 menimbulkan keraguan apakah penguasa angkatan bersenjata baru negara itu akan tetap berkomitmen untuk negosiasi. Bahkan, junta menempatkan kontrol militer atas semua aspek kebijakan Deep South sambil meningkatkan represi negara di wilayah tersebut (Srisompob Jitpiromsri, 2019, p. 47).

Dalam tulisan Zachari Abuza yang berjudul *The Ongoing Insurgency in Southern Thailand: Trends in Violence, Counter Counterinsurgency Operations, and the Impact of National Politics*, menjelaskan bahwa militer Thailand dan BRN (Barisan Revolusi Nasional) masih kerap melakukan pendekatan represif, tercatat dari 2004 hingga 2011 konflik ini telah menewaskan sedikitnya 4500 orang dan 9000 orang luka-luka. Kebanyakan korban berjatuh akibat serangan tembakan dan alat peledak (IED). Pemberontak menargetkan sasarannya kepada pemerintah, pasukan keamanan negara, serta Muslim Thailand yang telah bercampur dengan Buddha. Sedangkan militer Thailand gencar menangkap orang-orang yang dicurigai menjadi salah satu kelompok pemberontak di luar hukum. Dalam jurnal tersebut penulis juga berpendapat bahwa, ini menjadi salah satu pemicu mengapa konflik Thailand Selatan masih terus terjadi karena keduanya

masih mempertahankan tradisi lama yaitu menggunakan kekerasan. (Abuza, 2011, hal. 11-12).

Pendapat ketiga yang ditulis oleh David G. Timberman yang berjudul *Violent Extremism And Insurgency in Southern Thailand*, mengatakan bahwa pemerintah Thailand masih kurang serius dalam upaya dialog. Ada sedikit bukti bahwa Komandan Angkatan Darat Jenderal Prayuth Chan ocha terdengar sangat skeptis. Tidak ada sinyal yang jelas bahwa mungkin ada solusi politik di atas meja. Dalam tulisan ini penulis juga mengatakan aktor yang terlibat dalam perundingan atau negosiator harus memiliki pengaruh yang kuat dan benar-benar mewakili dari masing-masing aktor, hal ini agar dialog dapat berjalan lancar menjadi wadah aspirasi atau kemauan dari kedua belah pihak untuk menemukan solusi (Timberman, pp. 21-22).

Dalam buku yang berjudul *The War Report Armed Conflict In 2013: Armed Conflict in Thailand in 2013*, yang ditulis oleh Stuart Casey Maslen. Menjelaskan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik di Thailand Selatan, para pihak yang terlibat dalam NIAC (*Non International Armed Conflict*) ialah angkatan bersenjata dan polisi Thailand melawan BRN, khususnya pejuang kemerdekaan Pattani. Pasukan bersenjata dan polisi Thailand diperkirakan memiliki kekuatan 306.000, dengan 245.000 tentara cadangan. Baik tentara dan polisi terlibat dalam kontra pemberontakan di wilayah selatan negara. Dikatakan bahwa angkatan bersenjata telah berjuang untuk beradaptasi dengan pertempuran dibagian negara di mana banyak prajurit tidak memahami dialek melayu yang

diucapkan oleh mayoritas orang di wilayah selatan. Sedangkan BRN merupakan kelompok bersenjata yang beroperasi di Thailand Selatan. Sudah puluhan tahun BRN menggunakan taktik-taktik kekerasan di wilayah Selatan dalam menyuarakan posisinya sebagai pejuang Patani yang ingin bebas dan mendapat keadilan (Maslen, 2014, pp. 18-19).

1.7 Perspektif (Teori/Konsep)

Dalam membantu peneliti untuk menyelesaikan penelitian ini, peneliti menggunakan teori *Strategies and Tactics in Negotiation*, yang ditulis dalam buku (Pruitt & Carnevale, 1993) yang berjudul *Negotiation in Social Conflict* untuk membantu dalam mengkaji permasalahan yang ada dalam penelitian ini maupun menjawab persoalan-persoalan yang ada.

Dalam teori *Strategies and Tactics in Negotiation* ada lima strategi yang biasa digunakan oleh para negosiator antara lain:

Pertama, *Concession making*, yakni dilakukan dengan cara pengurangan tuntutan atau permintaan, sehingga dapat memberikan manfaat kepada pihak lain. Penurunan permintaan biasanya melibatkan pengurangan dalam tujuan mendasari tuntutan tersebut. Pruitt menyebutkan bahwa ada 3 temuan terkait dampak dari pembuatan konsesi dalam usaha dalam menciptakan hasil dari suatu negosiasi.

1. Jika kesepakatan tercapai, peran dan ketegasan negosiator memberikan suatu dampak yang besar. Negosiator yang malas dalam menggali suatu masalah tidak akan mendapatkan masalah yang memuaskan.
2. Ketidakmampuan negoisator untuk memperpanjang proses negosiasi biasanya menjadi kecil kemungkinannya untuk memperoleh kesepakatan.

3. Negoisator yang menuntut terlalu banyak akan gagal dalam mencapai suatu kesepakatan. Dan negosiator akan memperoleh nilai jika mencapai suatu kesepakatan. Terdapat hubungan *U-Shaped* antara kemampuan bertahan dengan kesepakatan yang dihasilkan (Carnevale D. G., 1993, pp. 28-29).

Kedua, *Contending*, merupakan suatu strategi dalam upaya menerapkan solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak yang lain yang berakhir secara *win-lose-solution*. Cara ini biasanya dilakukan dengan menyelesaikan masalah tanpa memedulikan kepentingan pihak lain. Masing-masing pihak berebut dan mengusahakan segala cara untuk jadi pemenang tanpa harus memperhatikan kepentingan pihak lain yang menjadi lawan politiknya (Dean G. Pruitt, 1993, pp. 30-34), bahkan berusaha agar pihak lawan menyerah atau mengalah. Adapun beberapa bentuk *contending*:

1. Ancaman (*threats*), merupakan suatu langkah atau upaya yang dilakukan dalam mencapai suatu kepentingan yang ingin dituju, dengan memberikan sanksi ancaman ataupun menghukum pihak lawan apabila tuntutan yang diinginkan tidak tercapai, dan dapat mendorong pihak lawan ke arah negosiasi.
2. Gangguan (*harassment*), merupakan tindakan yang dapat dilakukan kepada pihak lawan dengan memberikan sanksi ancaman yang melibatkan hukuman, *Harassment* lebih bersifat nyata di bandingkan dengan opsi *Threats* sebelumnya, karena dampak yang ditimbulkan dari *Harassment* sendiri akan lebih bersifat nyata dan akan membuat pihak lawan lebih menuruti kemauan dari si pelaku.

3. Komitmen posisi (*positional commitmen*), *Positional commitments* atau komitmen posisional dapat diartikan sebagai pernyataan yang diberikan berupa tawaran, di mana biasanya pernyataan yang diberikan tidak terlepas dari beberapa ancaman yang diberikan.
4. Argumen persuasif (*persuasive arguments*), ialah taktik yang dilakukan dengan cara persuasi. Tindakan persuasi dapat dilakukan dengan meyakinkan aktor lawan bahwa dirinya memiliki hak yang sah untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan keinginannya.

Ketiga, *Problem Solving*, yakni strategi dengan cara mencari alternatif agar bagaimana suatu masalah dapat dipecahkan dan dapat memuaskan aspirasi kedua belah pihak. Tidak hanya mementingkan kepentingan sendiri tetapi juga kepentingan pihak lain agar sepenuhnya dapat mencapai tujuan dan mengatasi ketegangan dan perasaan negatif di antara kedua belah pihak. Dalam strategi dasar ini menyarankan agar masing-masing pihak yang terlibat konflik berusaha mempertahankan aspirasinya, dengan catatan tetap menghormati kepentingan lawan. Adapun beberapa bentuk taktik dalam *problem solving* diantaranya:

1. *Expanding The Pie* adalah beberapa kesepakatan *win-win solutions* yang dibangun dengan meningkatkan sumber daya yang tersedia sehingga kedua belah pihak bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Hal ini yang disebut *expanding the pie*, jika diasumsikan sebagai suatu makanan yakni pai, maka kita dapat membagi ataupun memperluas makanan tersebut untuk dapat dirasakan oleh kedua belah pihak, sehingga masalah mereka dapat diselesaikan dengan mencari cara memperbesar sumber daya yang sesuai.

Contoh lainnya yakni seperti dalam mempertimbangkan penjualan dan produksi, masalah mereka dapat diselesaikan dengan mencari cara memperbesar kapasitas produksi yang sesuai.

2. *Exchanging concessions* yakni cara kedua adalah bertukar konsesi yaitu hak izin pada isu yang berbeda, dengan masing-masing pihak menghasilkan isu yang menjadi prioritas rendah untuk dirinya dan prioritas tinggi bagi pihak lain.
3. *Solving underlying concerns*, merupakan cara ketiga yakni dengan memecahkan masalah yang mendasar dengan cara pihak yang bersengketa atau pihak ketiga, memeriksa atau bertanya mengenai kekhawatiran yang mendasari masing-masing pihak mengambil suatu posisi dan mencari jalan untuk mencapai perhatian (concern) tersebut. Kekhawatiran tersebut bisa didasarkan suatu tujuan, nilai-nilai atau prinsip-prinsip tertentu (Dean G. Pruitt, 1993, pp. 36-46).

Keempat, *Inaction and Withdrawal*, dua startegi ini pada dasarnya berbeda dari strategi sebelumnya. Keduanya tidak mengarahkan negosiasi pada suatu kesepakatan.

Inaction, lebih cenderung diam dan tidak melakukan apa-apa. Kondisi ini mendeskripsikan bahwa pada suatu tahap perundingan masing-masing pihak akan menunggu tindakan pihak lain. Hal ini bisa mencerminkan beberapa pengertian bahwa salah satu pihak ingin mengatur strategi, atau di lain sisi ingin mengatur strategi dari putusan yang diambil oleh pihak lain.

Withdrawal, atau yang juga disebut menarik diri menekankan pada suatu upaya memilih meninggalkan situasi konflik, baik secara fisik maupun psikologis (Dean G. Pruitt, 1993, pp. 26-27).

Istilah Negosiasi sendiri sebenarnya sering digunakan dalam penerapan disiplin ilmu hubungan internasional. Negosiasi dapat diartikan sebagai diskusi antara dua pihak atau lebih dengan tujuan yang jelas yakni untuk menyelesaikan suatu perbedaan kepentingan dan dengan demikian dapat melepaskan diri dari konflik sosial. Pihak yang bersengketa dapat berupa individu, kelompok, organisasi atau unit politik seperti bangsa-bangsa, negosiasi biasa digunakan dikarenakan adanya perbedaan kepentingan antara pihak yang bersengketa, masing-masing memiliki preferensi ataupun kepentingan yang tidak sama antara satu sama lain, dalam hal ini antara militer Thailand dan BRN memiliki kepentingan dan tujuan yang berbeda. Sehingga dengan perbedaan kepentingan tersebut tentu ada beberapa perdebatan ataupun permasalahan yang terjadi yang mana saling bertentangan satu sama lain demi mengejar kepentingan masing-masing pihak. Beberapa strategi dan taktik dilakukan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan.

Dari beberapa teori negosiasi yang telah dijelaskan, maka penelitian ini akan mengambil strategi dasar yang biasa diterapkan oleh negosiator itu sendiri untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi, yakni *Contending* di mana merupakan upaya negosiasi yang digunakan untuk membuat pihak lawan mau mengakui ataupun menyetujui suatu kesepakatan dalam rangka mengejar kepentingan yang diperjuangkan, dalam strategi ini kedua belah pihak

menggunakan taktik yang hampir sama yaitu ancaman (*threats*), gangguan (*harassment*), komitmen posisi (*positional commitment*).

Kedua belah pihak saling memberikan ancaman dan tindakan-tindakan nyata yang justru berujung pada eskalasi konflik. Dalam hal ini militer Thailand sendiri menganggap bahwa masih maraknya insiden kekerasan di wilayah Selatan akan mengancam kestabilan negara Thailand mengingat itu menjadi konflik internal yang sudah lama dan belum menemukan solusi. Thailand sebagai negara berdaulat memiliki kekhawatiran dengan adanya kelompok pemberontak yang sudah banyak memakan korban jiwa. Sedangkan pihak BRN sendiri bersih keras akan tetap melanjutkan perjuangan walaupun dengan kekerasan untuk mendapatkan hak otonomi khusus wilayah Selatan.

Syarat utama dalam menggunakan taktik ancaman ini ialah dengan memberikan ancaman yang kredibel kepada lawan berunding. Ancaman yang dimaksud sebagai ancaman yang kredibel di sini ialah ancaman yang dapat diterima secara logis oleh pihak lawan, serta memang dapat diterapkan secara nyata kepada pihak lawan.

Selain *Contending*, terdapat pula strategi *Problem Solving* yang bertujuan mencari akar permasalahan yang sedang dirundingkan. *Problem solving* ialah upaya-upaya yang dilakukan guna mencari *win-win solutions*. Ada tiga langkah yang dapat dilakukan guna mencapai *win-win solutions*, antara lain *Expanding the pie*, *Exchanging concessions* dan *Solving underlying concerns*.

Jika dilihat dengan upaya-upaya yang telah diterapkan oleh kedua belah pihak untuk dapat saling menemukan akar permasalahan, yakni salah satunya

dengan adanya pertemuan resmi yang dilakukan oleh BRN dan pemerintah Thailand dalam upaya dialog damai 2013 di Kuala Lumpur. Di mana dalam pertemuan tersebut membahas masalah konflik yang berkepanjangan di wilayah selatan, dan kedua belah pihak berusaha untuk saling membangun kepercayaan, karena pada dasarnya penerapan upaya yang telah dilakukan keduabelah pihak guna mencapai *win-win solutions*.

Sehingga dalam strategi *Problem Solving*, upaya mencapai *win-win solutions* tersebut dapat dilihat antara lain dengan memberikan pertanyaan kepada pihak lawan guna memfokuskan kembali perundingan yang dilakukan, menggali informasi mengenai concern pihak lawan, membuat janji untuk memberikan kompensasi, atau menghilangkan sedikit kerugian lawan untuk memperoleh konsesi. Intinya, yang perlu dilakukan dalam setiap negosiasi ialah menggabungkan dan memilih seluruh strategi dan taktik yang ada dengan cermat agar kepentingan yang diperjuangkan dapat dicapai.

Penulis nantinya akan menggunakan dua dari lima strategi dalam negosiasi tersebut, yakni *Contending* dan *Problem solving*, di mana dari strategi yang digunakan tersebut, akan melihat bagaimana langkah-langkah ataupun upaya apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah Thailand ataupun pihak BRN, dan apa saja hambatan dari kedua belah pihak yakni pemerintah Thailand dan BRN yang mana nantinya dari penerapan kedua strategi tersebut akan berdampak kepada tercapai atau tidaknya proses dalam mencari solusi konflik di wilayah selatan.

Berdasar pada studi kasus yang dikaji pada riset ini, maka aplikasi strategis *concession making* tidak dapat diterapkan, karena tidak ditemukan

pengurangan tuntutan dari kedua belah pihak, baik pemerintah Thailand maupun BRN dalam mencapai suatu kesepakatan. Aplikasi strategi *inaction* dan *withdrawal* juga tidak dapat dilakukan karena sepanjang cakupan riset, kedua belah pihak tidak ada yang meninggalkan situasi konflik, mengingat konflik secara fisik masih terjadi, bahkan sampai saat ini.

Di dalam strategi *contending* penulis tidak menggunakan taktik *persuasive argument* taktik ini tidak dapat diterapkan, karena kedua belah pihak tidak menggunakan cara persuasi atau ajakan yang meyakinkan kepada pihak lawan akan alasan dan prospek yang didapatkan. Kemudian dalam strategi *Problem Solving*, taktik *Expanding The pie* dan *Underlying Problem Concern* juga tidak dapat diterapkan karena tidak ditemukan perluasan sumberdaya yang memuaskan kedua belah pihak dan tidak ditemukan cara dari masing-masing pihak untuk bertanya terkait akar masalah dan kekhawatiran-kekhawatiran dari pihak lawan.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian Kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati maupun dengan sumber-sumber media, berita yang diambil oleh peneliti.

1.8.2 Subjek Penelitian

Peneliti menentukan subjek penelitian berdasarkan sudut pandang dari pemerintah Thailand dan pihak BRN (Barisan Revolusi Nasional) dengan

permasalahan yang akan diteliti tentang bagaimana strategi dan taktik yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam upaya meredam konflik yang selama ini belum menemukan solusi. Pemilihan subjek penelitian atau responden berdasarkan studi pustaka maupun data-data yang nantinya akan digunakan dan dianggap sesuai dalam penelitian sesuai atas dasar pertimbangan tertentu dalam mencari informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.

1.8.3 Alat Pengumpul Data

1. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan pengumpulan data dan informasi dengan melakukan kegiatan kepastakaan melalui buku-buku, jurnal, berita maupun informasi dari penelitian terdahulu dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan untuk memperoleh data.

1.8.4 Proses Penelitian

Proses peneliti dalam penelitian dengan menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan studi pustaka yang dirasa layak serta sesuai dalam mencari sumber data terhadap penelitian ini, serta melihat data data yang dirasa sesuai dengan kebutuhan dalam proses meneliti, baik dengan data sekunder serta dari data statistik, studi pustaka maupun dokumentasi dan lainnya juga akan digunakan sebagai teknik pendukung untuk melengkapi data yang dibutuhkan dari penelitian ini.

BAB 2
STRATEGI *CONTENDING* DAN *PROBLEM SOLVING*
OLEH PEMERINTAH THAILAND

2.1 Strategi *Contending* oleh Pemerintah Thailand

Konflik yang terjadi antara Pemerintah Thailand dan BRN (*Barisan Revolusi Nasional*), memiliki pertentangan kepentingan kedua belah pihak yang bertikai sangat kuat. Masing-masing pihak tidak mau melepaskan tuntutan ataupun bahkan mengurangi tuntutannya masing-masing. Sebagai suatu negara yang berdaulat tentunya akan melakukan upaya-upaya maupun strategi dalam menjaga keamanan dan kestabilan negara dari para pemberontak, yang mana upaya-upaya tersebut dapat dilihat dari strategi *Contending* yang dilakukan pemerintah Thailand terhadap kelompok pemberontak BRN.

Melihat konflik yang berkepanjangan, fasilitas publik banyak yang hancur bahkan sampai merenggut banyak korban, hal tersebut tentu akan mengancam keamanan maupun stabilitas negara, maka pemerintah terutama militer Thailand tentu merasa perlu adanya tindakan dalam mendorong pemberontak BRN untuk menghentikan kekerasan terutama di wilayah selatan. Pemerintah Thailand melalui militernya menerapkan beberapa strategi maupun bentuk taktik yang digunakan dalam upaya menghentikan kekerasan yang ada di wilayah selatan yakni dengan menggunakan strategi *Contending*.

Strategi *Contending* merupakan segala macam usaha maupun upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik menurut kemauan seseorang tanpa

memperdulikan kepentingan pihak lain. Dalam strategi ini, masing-masing pihak yang berkonflik tetap mempertahankan aspirasinya dan membujuk pihak lain untuk mengalah. Tindakan yang bisa langsung diambil dari strategi *Contending* ini diantaranya dengan mengeluarkan ancaman, menjatuhkan penalti atau hukuman, melumpuhkan lawan, atau melakukan tindakan-tindakan yang mendahului pihak lain untuk memperoleh aspirasi tersebut tanpa sepengetahuan pihak lawan.

Strategi *Contending* juga dapat dicirikan dengan adanya penolakan terhadap aspirasi pihak lain, dan semua proses penyelesaian konflik harus menguntungkan tujuan dalam kekerasan sehingga menyebabkan hubungan-hubungan ketegangan ataupun ancaman. Hubungan yang tercipta dalam konflik ini adalah *Zero-sum game* atau hubungan menang kalah. Dampak strategis *Contending* adalah menang satu pihak dan kalah di pihak lain, atau keduanya kalah dan hancur.

Seperti yang disebutkan di atas bahwa strategi *Contending* sendiri memiliki bentuk taktik di dalamnya yakni berupa *Threats* (ancaman), *Harassment* (pelecehan), *Positional commitment* (komitmen posisi) ataupun *Persuasive arguments* (argumen yang bersifat persuasif). Di mana semua bentuk tersebut bertujuan untuk membujuk pihak lawan ataupun menekan lawan agar memberikan konsensi atau pemberian izin, dengan kepentingan yang ingin dicapai dari negosiasi itu sendiri (Dean G Pruit, Peter J. Carnevale, 1993, hal. 30-35). Dalam kasus ini, pihak pemerintah Thailand hanya menggunakan tiga dari empat

taktik yaitu *Threats* (ancaman), *Harrasment* (pelecehan), dan *Positional commitment* (komitmen posisi).

2.1.1 Upaya Pemerintah Thailand Melalui Bentuk Taktik *Threats* (Ancaman)

Dalam strategi *Contending* sendiri *threats* ataupun ancaman sering dijadikan sebagai suatu langkah dalam mencapai suatu kepentingan yang ingin dituju. Dengan memberikan ancaman ataupun menghukum pihak lawan apabila tuntutan yang diinginkan tidak tercapai merupakan salah satu bentuk upaya yang dapat dilakukan oleh strategi *Contending* tersebut, tidak hanya dalam mencapai tujuan ataupun kepentingan digunakan bentuk ancaman. Namun bentuk ancaman dari *Contending* itu sendiri juga biasa digunakan untuk mendorong pihak lawan menuju ke arah negosiasi, negosiasi akan lebih efektif apabila ancaman tersebut makin besar dan dapat memberikan tekanan kepada pihak lawan (Pruitt & Carnevale, 1993, hal. 30-31).

Bentuk-bentuk ancaman tersebut dapat makin meningkat apabila pada masa lalu pernah melakukan suatu ancaman untuk mencapai kepentingan yang sama kepada pihak yang dituju, kemudian ancaman tersebut dapat lebih efisien ketika yang melakukan ancaman tersebut memiliki kekuatan ataupun sumber daya yang dianggap cukup kuat. Namun pada dasarnya suatu ancaman akan dapat menimbulkan sisi buruk dari apa yang dilakukan kepada pihak lawan. Di mana hal tersebut dapat berupa suatu pertentangan maupun kebencian yang akan berdampak terhadap ancaman itu sendiri.

Karena pada dasarnya ancaman yang diberikan tersebut tentu akan memberikan batasan kepada pihak lawan untuk dapat melakukan kebebasan

ataupun memilih langkah upaya yang akan dilakukannya. Sehingga dengan memberikan ancaman-ancaman tersebut kepada pihak yang dituju, tidak sedikit mereka melakukan perlawanan terhadap pihak yang mengancam tersebut, dan juga tidak sedikit mereka akan melakukan ancaman balasan kepada pihak yang mengancam. Sehingga apabila strategi ini dilakukan maka tidak sedikit dampak yang akan dirasakan, karena hal tersebut akan berpengaruh kepada jangka panjang yang akan ditimbulkan dengan bentuk ancaman tersebut (Carnevale, 2003).

Namun memang ada beberapa langkah ancaman yang dapat diberikan agar dapat mengurangi perlawanan ataupun kebencian yang akan ditimbulkan dari pihak yang dituju, yaitu dengan memberikan ancaman secara tidak langsung, atau secara diplomatis. Di mana biasanya bentuk ancaman ini dapat berupa sindiran yang ditujukan dengan tampak memaksa, sehingga hal tersebut akan dirasakan oleh pihak lawan ataupun pihak yang dituju, namun tidak satupun dari pendekatan ini yang mungkin sepenuhnya dapat menangkal dari apa yang didapat oleh ancaman itu sendiri (Pruitt & Carnevale, 1993, hal. 30-32).

Upaya-upaya yang dilakukan oleh militer Thailand dalam meredam konflik dengan menggunakan taktik *Threats* (Ancaman) dapat dilihat dari pendekatan militer yang dilakukan oleh militer Thailand salah satunya dengan memberlakukan undang-undang darurat militer tahun 2004 pada masa pemerintah Thaksin Sinawatra, untuk menjadi alat hukum dalam membantai dan mengawasi pergolakan yang terjadi di wilayah selatan Thailand. Undang-undang tersebut diterapkan setelah terjadinya perampokan senjata di markas militer di provinsi Narathiwat. Kemudian pada tahun 2005 terjadi perusakan pusat-pusat listrik di

provinsi Yala, yang mengakibatkan beberapa distrik di wilayah Yala mengalami kegelapan (Pusat Berita Selatan, 2019). Pemberlakuan undang-undang darurat di nilai langkah yang tepat demi keamanan nasional dan keamanan publik. Undang-undang darurat tersebut hingga saat ini masih diterapkan.

Undang-undang memberi wewenang kepada perwira militer untuk mencari warga dan menangkap siapa pun yang dicurigai terlibat dalam kegiatan yang mengancam keamanan tanpa surat perintah resmi. Dengan undang-undang ini, militer bebas menangkap meski hanya bersenjatakan kecurigaan (Human Right Watch, 2014).

Penerapan undang-undang darurat militer ini tentu saja mengancam siapa pun terutama gerakan pemberontak yang selama ini gencar dalam melakukan aksi kekerasan. Diberlakukannya undang-undang darurat militer juga menciptakan ketegangan dengan kehadiran para personel militer ditengah-tengah masyarakat. Sebagai contoh, ancaman terhadap seorang aktivis yang bernama Faisal, saat itu Faisal sedang mendokumentasikan para petugas militer yang kembali kerumah bersama pria yang sempat ditahan pada juni 2017. Karena aksinya ini faisal diancam akan ditangkap jika tidak menghapus foto-foto hasil dokumentasinya. Dan ancaman penangkapan kerap sekali dilontarkan pihak militer kepada siapa pun yang tidak mematuhi aturan. Akibat dari undang-undang militer ini justru pemberontakan makin menguat, hal ini tentunya didasari atas kekecewaan masyarakat Thailand Selatan terhadap pemerintah yang selalu mengutamakan pendekatan militer untuk mengatasi konflik.

Tahun 2015, Jenderal Prayuth Chan-Ocha yang menjabat sebagai perdana menteri Thailand saat ini telah mengajukan untuk di akhirnya undang-undang darurat, tetapi beliau telah mempersiapkan pasal 44 yang akan digunakan untuk menggantikan undang-undang darurat (Puspaningtyas, 2015). Didalam pasal 44 konstitusi baru Thailand mengizinkan perdana menteri untuk mengeluarkan perintah eksekutif guna menghalangi atau membasmi ancaman terhadap keamanan negara. Jendral Prayuth mengatakan para tentara akan dapat menangkap orang jika terjadi insiden, tanpa surat penangkapan. Bahkan pasal ini melarang masyarakat untuk berkumpul dan membatasi media (BBC, 2015).

Bentuk-bentuk ancaman yang dilakukan militer tersebut dengan memberlakukan undang-undang darurat militer, kemudian menerapkan instrument militer di wilayah selatan tentunya menjadi suatu tekanan atau ancaman bagi kelompok pemberontak terutama BRN yang disebut-sebut menjadi kelompok gerilyawan paling kuat. Upaya tersebut dilakukan dengan tujuan mencapai atau menciptakan suatu kepentingan bagi si pembuat ancaman yakni pemerintah Thailand yang mana tujuan atau kepentingannya, agar para dapat membatasi ruang gerak pemberontak untuk mengkhiri kekerasan atau dalam artian mengalah.

2.1.2 Upaya Militer Thailand Melalui Bentuk Taktik *Harrasment* (Pelecehan)

Jika sebelumnya pemerintah Thailand menggunakan taktik *Threat* atau ancaman dalam upaya mengurangi kekerasan di wilayah selatan. Pemerintah Thailand melalui militernya juga kerap menggunakan taktik *Harrasment*. *Harassment* atau pelecehan merupakan tindakan yang dapat dilakukan kepada pihak lawan dengan memberikan sangsi ancaman yang melibatkan hukuman,

Harassment lebih bersifat nyata dibandingkan dengan opsi *Threats* sebelumnya, karena dampak yang ditimbulkan dari bentuk *Harassment* sendiri akan lebih bersifat nyata dan akan membuat pihak lawan lebih menuruti kemauan dari si pelaku *Harassment*, dan juga sebagai pelaku *Harrasment* akan lebih mudah untuk mengambil tindakan dari respons yang nantinya diberikan oleh pihak lawan, apabila pihak lawan dapat menuruti keinginan si pelaku maka *Harassment* tersebut dapat dihentikan, namun sebaliknya apabila pihak yang dituju justru memberikan dampak yang bertentangan dari apa yang diinginkan pelaku, maka pelaku dapat langsung memberikan tindakan berupa hukuman dan sebagainya, namun tidak berbeda dengan *Threats* bahwa akan ada dampak yang ditimbulkan ataupun sisi negatif dari penggunaan opsi ini, yaitu adanya kebencian ataupun perlawanan yang akan diberikan dari si pihak lawan (Pruitt & Carnevale, 1993, hal. 32).

Dilihat dari taktik yang dilakukan militer Thailand melalui opsi tersebut, hal ini berkaitan sekali dengan pengimplementasian undang-undang darurat militer yang sudah diberlakukan sejak tahun 2004 bahkan hingga saat ini. Walaupun beberapa kali mengalami pembaruan namun isinya tidak jauh berbeda. Di mana undang-undang darurat ini memberikan kewenangan terhadap militer untuk menangkap siapa saja yang dicurigai sebagai kelompok separatis di luar hukum.

Melalui undang-undang ini militer kerap kali melakukan operasi militer di wilayah Selatan terutama di empat distrik yaitu Songhkla, Yala, Patani, dan Narathiwat. Pemerintah Thailand mengandalkan kekuatan militer untuk

menghadapi pemberontakan di selatan. Sekitar 65.000 tentara dan polisi ditempatkan di kawasan itu. Tindakan militer ini juga dibarengi dengan pola-pola represif dari militer Thailand (Lehmann, 2013).

Sejak kudeta perdana menteri Yingluck Shinawatra, Thailand secara keseluruhan telah terlihat semakin turun dalam praktik demokrasi dan perlindungan hak-hak individu warga. Seperti kasus pembunuhan diluar hukum sejak 2004-2017 tercatat 382 kasus yang dilakukan oleh militer di wilayah selatan Thailand (Akbar C. , 2018).

Taktik *Harrasment* (pelecehan) kerap kali dilakukan oleh militer Thailand. Pada Januari 2016, *Patani Human Rights Network and Cross Cultural Foundation* merilis laporan bersama yang merinci 54 kasus dugaan penyiksaan dan perlakuan buruk oleh otoritas Thailand antara 2014 dan 2015. Militer sering kali menangkap warga yang dicurigai sebagai kelompok separatis, tidak hanya menangkap militer juga tidak segan membunuh mereka, dalam satu contoh kasus di bulan Maret 2015, empat orang tewas dibunuh oleh pasukan keamanan, pemerintah mengatakan mereka kelompok pemberontak, namun tim investigasi mengatakan bahwa mereka adalah warga sipil yang tak bersalah (Agestu, 2015).

Taktik *Harrasment* lainnya yang dilakukan oleh militer Thailand terlihat pada tanggal 10 hingga 12 Oktober 2016, tercatat 44 orang (8 perempuan dan 36 laki-laki) ditangkap di Bangkok, Thailand. Penangkapan dilakukan secara sewenang-wenang oleh kepolisian Thailand dengan alasan untuk mencegah meningkatkan tindak terorisme mengingat akan ada peringatan peristiwa *Tak Bai* pada 25 Oktober 2016 (Ibnihusen, 2016). Insiden *Tak bai* yang terjadi pada 25

Oktober 2004, menjadi sejarah kelam bagi masyarakat Melayu Patani, ketika saat itu terjadi demonstrasi menuntut pembebasan enam warga yang ditahan. Namun, akhirnya ricuh dan terjadi bentrokan antara warga dan aparat, yang mengakibatkan 78 warga meninggal dunia (Dikarma, 2019).

Pada Februari 2016, Muslim Attorney Center menerbitkan laporan pelanggaran Hak Asasi Manusia dari penggunaan hukum khusus di wilayah provinsi perbatasan Selatan, yang mendokumentasikan 33 kasus dugaan penyiksaan terhadap tersangka pemberontak pada tahun 2015. Penerbitan laporan ini bertujuan untuk mendorong tanggapan pemerintah menyelidiki tuduhan tersebut dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah tindakan yang melanggar pada masa mendatang. Namun sebaliknya, Pemerintah Thailand justru mengambil tindakan hukum terhadap penerbit tersebut, dengan mengajukan tuntutan pidana tentang pencemaran nama baik dan pelanggaran *Computer Crime Act*.

Upaya yang dilakukan militer melalui strategi *Contending* dengan bentuk *Harrasment* dapat dikatakan termasuk kedalam strategi serta bentuk *Harrasment* yang di jelaskan oleh Dean G. Pruitt. Karena beberapa tindakan yang dilakukann oleh militer memiliki tujuan agar pemberontak berpikir kembali dalam melakukan kekerasan mengingat konseskuensi yang didapat, dengan kata lain agar para pemberontak menyerah dan mundur. Maka upaya tersebut sesuai dengan apa yang telah disebutkan dalam buku *Strategic and Tactic Negotiation* oleh Pruitt, di mana dalam buku tersebut menyebutkan bahwa *Harrasment* sendiri bersifat nyata dan

tentunya memberikan tekanan yang lebih besar kepada lawan agar menuruti keinginan pihak militer Thailand (Pruitt & Carnevale, 1993, p. 32).

2.1.3 Upaya Militer Thailand Melalui Taktik *Positional Commitments*

(Komitmen posisional)

Positional commitments atau komitmen posisional dapat diartikan sebagai pernyataan yang diberikan berupa tawaran, di mana biasanya pernyataan yang diberikan tidak terlepas dari beberapa ancaman yang diberikan. Hal tersebut bertujuan untuk menghentikan negosiasi jika pihak lain tidak menerima tawaran ini, dengan kata lain tawaran yang diberikan tidak dapat ditawar kembali. *Positional commitments* lebih efektif apabila dalam mencapai suatu kesepakatan akan terjadi kegagalan, oleh karena itu cara ini hanya berguna sedikit dalam mencapai suatu kepentingan, karena kegagalan yang nantinya akan mencapai kesepakatan belum tentu sepenuhnya merugikan pihak lawan. (Pruitt & Carnevale, 1993, hal. 32-33).

Upaya pemerintah Thailand melalui bentuk taktik *Positional Commitment* terlihat dari komitmen pemerintah yang berpegang teguh pada pendiriannya. Setelah pihak BRN memutuskan untuk keluar dan menolak keikutsertaannya dalam MARA Patani tentunya ini menjadi hambatan proses dialog, karena pengaruh BRN untuk mengontrol kondisi dilapangan sangat kuat. Namun, Disisi lain BRN juga ingin berunding dengan pemerintah Thailand secara formal, bersifat langsung dengan mengikuti norma-norma internasional. Oleh karenanya, pemerintah Thailand menawarkan BRN untuk kembali kemeja perundingan namun dengan syarat mau bergabung kembali dengan MARA Patani (Siregar, 2017). Opsi ini

sudah tidak bisa ditawar kembali, mengingat aktor perundingan saat ini dipegang oleh MARA Patani dan pemerintah Thailand.

Upaya yang dilakukan pemerintah Thailand melalui strategi *Contending* melalui bentuk *Positional Commitments* dikatakan sesuai dengan apa yang dilakukan pihak pemerintah Thailand terhadap BRN. Hal ini terlihat dari tawaran serta komitmen yang dikeluarkan pemerintah Thailand yang bersifat memaksa. Dengan tawaran yang bersifat memaksa dan tidak bisa ditawar kembali, maka suatu perjanjian maupun negosiasi akan menjadi gagal jika kedua belah pihak tidak mengambil ataupun menerima tawaran tersebut (Pruitt & Carnevale, 1993, hal. 32-33).

2.2 Strategi *Problem Solving* Militer Thailand

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pasukan militer Thailand melalui strategi *Contending* telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, di mana dalam mencapai negosiasi ataupun kepentingan yang dituju akan mengalami tingkat kegagalan yang cukup tinggi dengan menerapkan strategi tersebut. Untuk itu militer Thailand perlu melakukan strategi lain dalam mendorong proses perdamaian yaitu dengan menggunakan strategi *Problem Solving*.

Strategi *problem solving* merupakan strategi yang digunakan untuk mencapai suatu kepentingan atau dapat dikatakan strategi dalam mencapai *Win-win Solution*, yakni masing-masing pihak merasa menang atas apa yang mereka inginkan. Dalam strategi *problem solving*, pemecahan masalah dapat dilakukan dengan kerja sama sehingga pemecahan masalahpun yang ada dari kedua belah pihak dapat diterima masing-masing secara hukum. Dalam strategi *Problem*

Solving ada tiga bentuk yang digunakan untuk dapat mencapai *Win-win Solution* tersebut yakni *Expanding the pie*, *Exchanging concessions*, *Solving underlying concerns*, di mana semua bentuk strategi dalam *Problem Solving* tersebut bertujuan untuk dapat menemukan permasalahan dan dapat diselesaikan secara bersama. Namun dalam kasus ini pemerintah Thailand hanya menggunakan satu taktik yaitu dengan taktik *Exhcanging Cossesion* (Pruitt & Carnevale, 1993, hal. 36).

2.2.1 Upaya Militer Melalui Bentuk Taktik *Exchanging Concessions*

Exchanging Concessions merupakan cara yang bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dan mencapai *Win-win Solution*, yaitu dengan cara bertukar konsesi mengenai berbagai masalah yang ada. Di mana masing-masing pihak dapat menghasilkan isu yang berbeda yang menjadi prioritas tinggi terhadap pihak lain. Seperti contoh, suatu pesanan 500 setelan mendapat prioritas lebih tinggi dibandingkan dengan 1000 setelan, 500 setelan dapat diselesaikan dalam waktu dua bulan sedangkan 1000 setelan diselesaikan dalam waktu empat bulan. Sehingga dalam hal ini yang lebih diprioritaskan untuk dapat diselesaikan dalam pemesanan setelan tersebut yaitu pada pesanan 500 setelan. Di mana diasumsikan bahwa pesanan 500 setelan tersebut menjadi prioritas tinggi terhadap pihak lain, karena dianggap lebih memiliki waktu yang lebih cepat untuk diselesaikan, sehingga pesanan pun akan lebih cepat diterima oleh pemesan. Sedangkan 1000 setelan menjadi prioritas rendah karena pengerjaannya memiliki waktu yang lebih lama (Pruitt & Carnevale, 1993, hal. 36-37).

Strategi melalui bentuk *Exchanging Consession* tersebut dapat dilihat dari upaya pemerintah Thailand dalam mencapai proses perdamaian. Di mana dimulai dari niat pemerintah dibawah pemerintahan Yingluck Sinawatra untuk melakukan proses dialog damai yang telah ditandatangani oleh kedua pihak yaitu pemerintah Thailand yang diwakili oleh Jenderal Paradorn Pattambutr dan kelompok pemberontak BRN (Barisan Revolusi Nasional) yang diwakili oleh Hassan Taib di Kuala Lumpur 28 Februari 2013. Hal ini menjadi langkah yang baik bagi kedua belah pihak untuk saling meningkatkan rasa saling percaya (Group, 2016).

Dalam proses dialog damai dengan Malaysia sebagai Fasilitator, menghasilkan satu kesepakatan di antara kedua belah pihak atas inisiatif Malaysia. Kesepakatan tersebut terkait dengan genjatan 40 hari selama bulan Ramadhan. Atau bisa disebut dengan "*Ramadhan Peace Inisiative*". Selama periode ini pihak A (Militer Thailand) akan melanjutkan tanggung jawabnya terhadap pencegahan kejahatan dan pemantauan untuk tujuan keamanan publik. Pihak A juga harus menjamin keamanan dan kesejahteraan semua warga negaranya terlepas dari latar belakang ras, dan agama. Pihak A akan menahan diri dari tindakan agresif sehubungan dengan masalah kemanan yang disebabkan oleh kerusuhan di selatan (Bangkok post, 2013).

Kemudian dari pihak B (BRN), akan berupaya untuk tidak menciptakan kekerasan termasuk serangan senjata, pemboman, atau penyergapan terhadap militer Thailand dan masyarakat. Pihak B juga akan menjamin hak-hak, kebebasan dan kemanan non-muslim akan selalu dihormati, dihargai dan dilindungi. Selama periode ini, kedua belah pihak akan bekerja keras untuk

memastikan Ramadhan tahun 2013 bebas dari kekerasan untuk menunjukan ketulusan, komitmen dan keseriusan dari kedua belah untuk menemukan solusi. Kedua belah pihak percaya bahwa perdamaian adalah cara terbaik untuk perdamaian yang abadi dan tahan lama. Kesepakatan ini adalah untuk periode 40 hari dimulai dari 10 Juli sampai 18 Agustus, hal tersebut harus menjadi perhatian kedua belah pihak untuk mengamankan wilayah terutama di tiga distrik di wilayah selatan yaitu Patani, Yala, Narathiwat (Bangkok post, 2013).

Namun dalam seminggu pertama, aparat keamanan sudah menembak mati beberapa pemuda aktivis perjuangan. Hal ini disebabkan karena terdapat kelemahan dalam inisiatif tersebut. Diantaranya tidak disebutkan secara jelas siapa yang akan mengontrol keadaan dilapangan selama “gencatan senjata” tersebut. Masyarakat juga tidak menerima informasi yang tepat tentang apa yang disepakati seperti ketika ada pelanggaran atau kekerasan harus diadukan kemana. Karena tidak tahan diserang sepihak akhirnya pejuang bersenjata melakukan balas dendam dengan menyerang pihak keamanan. Damai Ramadhan pun gagal dan kedua pihak saling menyalahkan satu sama lain (Jitpiromsri, 2013).

Upaya yang kedua, terlihat pada masa pemerintahan Jendral Prayuth Chan-Ocha ditahun 2015 ingin membangkitkan kembali proses dialog ke meja perundingan setelah proses dialog tahun 2013 gagal. Pada proses dialog ini aktor perundingan berubah yakni yang sebelumnya antara pemerintah Thailand dan BRN. Pada masa Jendral Prayutt di mulai babak baru yaitu antara pemerintah Thailand yang dipimpin Jendral Akasara Kerhdphol dan MARA Patani yaitu sebuah organisasi yang memayungi beberapa kelompok pemberontak di

dalamnya. Pada dialog kali ini BRN menolak untuk berpartisipasi, karena menganggap negosiatornya belum terlatih dan juga karena ingin ada perwakilan masyarakat internasional untuk mengawasinya (Group, Southern Thailand's Peace Dialogue: Giving Substance to Form, 2020).

Pada babak ini kedua belah pihak mempromosikan gagasan "*Safety Zone*" atau zona aman di tiga provinsi Selatan Thailand. Zona aman ini bertujuan untuk melakukan gencatan senjata di dalam area yang telah ditentukan, mengakhiri kekerasan terutama terhadap pasukan keamanan dan warga non muslim. Namun, sebagai gantinya pemerintah memberikan sedikit otonomi bagi daerah tersebut. Pada 2016, kedua belah pihak sepakat menetapkan distrik Joh Ai Rong di provinsi Narathiwat sebagai distrik pertama. Kedua belah pihak membuat "rumah aman" untuk perwakilan dua belah pihak yang akan bekerjasama dalam kegiatan untuk memajukan perdamaian.

Namun setelah tiga tahun mengadakan pertemuan, namun pada kenyataannya "*Safety Zone*" tidak begitu memberikan dampak yang signifikan. dan April 2018, dialog seakan lumpuh, setelah delegasi Thailand di bawah dewan keamanan nasional dua kali menolak menandatangani dokumen yang dinegosiasikan dengan MARA Patani. Pemerintah menolak untuk menandatangani perjanjian karena khawatir hal tersebut akan memberikan legitimasi pada pemberontak dan menjeratnya dalam bahaya hukum (Group, Crisis Group Web site, 2020).

Ketidakikutsertaan BRN juga menjadi salah satu penyebab mengapa dialog mengalami kebuntuan. Jenderal Prayut Chan-Ocha sendiri meragukan

dialog tersebut karena selama BRN tidak masuk meja perundingan akan sulit. Karena BRN kelompok utama yang mengendalikan situasi dilapangan. Pertemuan yang dilakukan selama 3 tahun, seperti tidak ada hasilnya, karena insiden kekerasan masih terjadi.

Upaya yang dilakukan oleh militer pemerintah Thailand melalui strategi *Problem solving* dengan bentuk *Exchanging Consession* dapat dikatakan sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Dean G. Pruitt karena, pihak militer Thailand telah melakukan pertukaran konsesi kepada BRN dalam mencapai proses perdamaian, dengan melakukan pertemuan dan pendandatangan proses dialog damai dan membahas masalah yang akan di selesaikan. Hal ini tentunya menjadi langkah awal yang baik untuk kedua belah pihak untuk sama-sama saling membangun kepercayaan. Dengan disepakatinya “*Ramadhan Peace Inisiative*” dan usaha menetapkan “*Safety Zone*”. Tetapi seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwasanya meskipun militer Thailand telah melakukan upaya yang ada dalam strategi *Problem solving* dengan bentuk *Exchanging Consession* terlepas dari apapun hasil yang dicapai dari upaya atau kesepakatan yang terjadi, pada kenyataanya tidak memberikan hasil yang memuaskan. Kurangnya prosedural dan komitmen di antara kedua pihak, menjadi hambatan besar dalam proses perdamaian (Pruitt & Carnevale, 1993, hal. 36-37).

Namun, upaya yang dilakukan militer Thailand melalui taktik *Exchanging Consession*, sudah dapat dikatakan sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Dean G. Pruitt bahwasanya apabila menginginkan tercapainya suatu kesepakatan dalam bentuk ini maka, negosiator harus mengutamakan prioritas lawan, yang mana

dalam hal ini mau mengutamakan kemauan dari pihak BRN. Maka usaha tersebut telah dilakukan militer Thailand dengan menahan rasa egonya dan akhirnya mau untuk melakukan proses dialog damai dengan BRN (Pruitt & Carnevale, 1993, hal. 36-37).

Tabel 2. 1 Aplikasi Strategies and Tactic In Negotiation dalam bentuk Contending dan Problem Solving oleh Pemerintah Thailand

Strategi*	Taktik*	Penjelasan Taktik	Upaya yang dilakukan BRN
<i>Contending</i>	<i>Threats</i> (Ancaman)	<i>Threats</i> (Ancaman) merupakan suatu langkah atau upaya yang dilakukan dalam mencapai suatu kepentingan yang ingin dituju, dengan memberikan ancaman ataupun menghukum pihak lawan apabila tuntutan yang diinginkan tidak tercapai, dan dapat mendorong pihak lawan ke arah negosiasi	-Dengan undang-undang darurat, Thailand menggunakan instrumen militer untuk mengancam pasukan pemberontak dengan meletakkan militer diwilayah selatan. -Setiap masuk periode darurat setiap warga wajib mematuhi aturan seperti tidak boleh berkerumun, tidak boleh meliput media dsb. Jika melanggar ada konsekuensi yang didapat.
	<i>Harassment</i> atau pelecehan	<i>Harassment</i> atau pelecehan merupakan tindakan yang dapat dilakukan kepada pihak lawan dengan memberikan sanksi ancaman yang melibatkan hukuman, <i>Harassment</i> lebih bersifat nyata di bandingkan dengan opsi <i>Threats</i> sebelumnya, karena dampak yang ditimbulkan dari <i>Harassment</i> sendiri akan lebih bersifat nyata dan akan membuat pihak lawan lebih menuruti kemauan dari si pelaku.	- Dibawah undang - undang darurat militer, membuat pasukan keamanan melakukan tindakan sewenang-wenang. Contoh di Maret 2015, empat orang tewas dibunuh oleh pasukan keamanan, pemerintah mengatakan mereka kelompok pemberontak, yang ternyata setelah diselidiki korban adalah warga sipil. -Penangkapan terhadap 48 mahasiswa di Bangkok Oktober 2016 tanpa tuduhan yang jelas, walaupun beberapa diantaranya dibebaskan.

Strategi*	Taktik*	Penjelasan Taktik	Upaya yang dilakukan BRN
	<i>Positional commitments, komitmen posisional</i>	<i>Positional commitments</i> , komitmen posisional dapat diartikan sebagai pernyataan yang diberikan berupa tawaran yang memaksa, dimana biasanya pernyataan yang diberikan tidak terlepas dari beberapa ancaman yang diberikan, hal tersebut bertujuan untuk menghentikan negosiasi jika pihak lain tidak menerima tawaran ini.	-Pemerintah Thailand menawarkan kepada BRN, jika ingin melanjutkan perundingan BRN harus masuk ke MARA Patani.
<i>Problem Solving</i>	<i>Exchanging concessions</i>	- <i>Exchanging concessions</i> merupakan cara yang bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dan mencapai <i>Win-win Solution</i> , yaitu dengan cara bertukar konsesi mengenai berbagai masalah yang ada. Di mana masing-masing pihak dapat menghasilkan isu yang berbeda yang menjadi prioritas rendah terhadap dirinya dan menjadikan isu tersebut prioritas tinggi terhadap pihak lain	- Militer bersedia melakukan gencatan 40 hari selama bulan Ramadhan atau " <i>Ramadhan Peace Initiative</i> ", dan mau menerima tuntutan BRN untuk menarik pasukannya di tiga wilayah selatan. -Militer Thailand dan pihak MARA Pattani sepakat menetapkan " <i>Safety Zone</i> "

Sumber: Diolah dari (Pruitt & Carnevale, 1993, hal. 36-40)

BAB 3

STRATEGI *CONTENDING* DAN *PROBLEM SOLVING*

OLEH BARISAN REVOLUSI NASIONAL (BRN)

3.1 Strategi *Contending* BRN (Barisan Revolusi Nasional)

Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan strategi *Contending* dari perspektif BRN (Barisan Revolusi Nasional). Sesuai dengan penjelasan sebelumnya, Strategi *Contending* merupakan segala macam usaha maupun upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik menurut kemauan seseorang tanpa memedulikan kepentingan pihak lain. Strategi *Contending* juga dapat dicirikan dengan adanya penolakan terhadap aspirasi pihak lain, yang kerap kali justru menimbulkan ketegangan. Hubungan yang tercipta dalam konflik ini adalah *zero-sum game* tau hubungan menang kalah. Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa strategi *Contending* sendiri memiliki bentuk taktik di dalamnya yakni berupa *Threat* (ancaman), *Harrasment* (pelecehan), *Possitional Commitment* (komitmen posisi), ataupun *Persuasive arguments* (argument yang bersifat persuasif). Dalam kasus ini BRN hanya menggunakan tiga taktik yaitu *Threat*, *Harrasment*, dan *Possitional Commitment* (Dean G Pruit, Peter J. Carnevale, 1993, hal. 30-35).

3.1.1 Upaya BRN Melalui Bentuk Taktik *Threats* (Ancaman)

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa taktik *Threats* atau ancaman, dalam strategi *Contending* sendiri sering dijadikan sebagai suatu langkah dalam mencapai suatu kepentingan yang ingin dituju. Dengan

memberikan ancaman ataupun menghukum pihak lawan apabila tuntutan yang diinginkan tidak tercapai merupakan salah satu bentuk upaya yang dapat dilakukan oleh strategi *Contending* tersebut, tidak hanya dalam mencapai tujuan ataupun kepentingan digunakan bentuk ancaman. Namun bentuk ancaman dari *Contending* itu sendiri juga biasa digunakan untuk mendorong pihak lawan menuju ke arah negosiasi, negosiasi akan lebih efektif apabila ancaman tersebut makin besar dan dapat memberikan tekanan kepada pihak lawan (Pruitt & Carnevale, 1993, hal. 30-31).

Dalam taktik *Threat* atau ancaman BRN beberapa kali melakukan ancaman terutama setelah proses dialog damai antara BRN dan pihak pemerintah Thailand yang sempat dilakukan di Kuala Lumpur dengan Malaysia sebagai fasilitator ditahun 2013. BRN Menyatakan lima tuntutan yang harus dipenuhi pihak Thailand, tuntutan yang dirasakan paling berat oleh pihak Thailand di antaranya disebutkan bahwa Bangkok harus mengakui ketuanan bangsa Melayu di atas bumi Patani yang dijajah secara mutlak sejak 1902. Yang tidak kalah penting, pihak pemberontak menginginkan proses dialog damai harus mendapat dukungan dari parlement Thailand dan dialog juga harus menjadi agenda nasional. Juga harus mengangkat status Malaysia menjadi mediator, bukan hanya sebagai fasilitator. Dalam proses dialog harus ada pengamat asing seperti ASEAN atau LSM asing. BRN harus dianggap sebagai gerakan pembebasan dan semua tersangka ditahan karena serangan teror harus dibebaskan (Amijoyo, 2019, p. 108).

Namun, tuntutan tersebut ditolak dan dianggapi dengan sikap dingin militer pemerintah. Pemerintah terang-terangan menolak tuntutan tersebut, Jenderal Prayut Chan-Ocha yang menjabat perdana menteri Thailand setelah menggantikan posisi Yingluck Shinawatra menolak tuntutan tersebut dengan alasan “*ini masalah internal negara, kenapa harus melibatkan pengamat asing*” ungkapan tersebut dinilai sebagai ketakutan pemerintah akan upaya desentralisasi yang berujung pemisahan. Mengetahui pernyataan tersebut, BRN dengan tegas mengancam pemerintah akan tetap melakukan tindakan kekerasan dan tetap berjuang dengan senjata dan tidak akan mau kembali ke meja perundingan jika tuntutanya tersebut tidak di penuhi pemerintah Thailand (Bangkok, 2013).

Ancaman tersebut tentunya, akan membuat militer Thailand dan juga penduduk sipil merasa takut dan tertekan, mengingat banyak sekali kekerasan yang sudah terjadi dengan korban yang tidak sedikit, setidaknya dari eskalasi konflik ditahun 2004 sampai 2015 telah merenggut 6500 korban meninggal dunia dan 12000 mengalami luka-luka. Sehingga pemerintah harus meninjau kembali tuntutan yang dikeluarkan oleh BRN (Pathan, 2016).

3.1.2 Upaya BRN Melalui Bentuk Taktik *Harassment* (Pelecehan)

Seperti yang sudah penulis jelaskan di atas, taktik *Harassment* atau pelecehan merupakan tindakan yang dapat dilakukan kepada pihak lawan dengan memberikan sanksi ancaman yang melibatkan hukuman, *Harassment* lebih bersifat nyata dibandingkan dengan opsi *Threats* sebelumnya, karena dampak yang ditimbulkan dari bentuk *Harassment* sendiri akan lebih bersifat nyata dan akan membuat pihak lawan lebih menuruti kemauan dari si pelaku *Harassment*,

dan juga sebagai pelaku *Harrasment* akan lebih mudah untuk mengambil tindakan dari respons yang nantinya diberikan oleh pihak lawan, apabila pihak lawan dapat menuruti keinginan si pelaku maka *Harassment* tersebut dapat dihentikan, namun sebaliknya apabila pihak yang dituju justru memberikan dampak yang bertentangan dari apa yang diinginkan pelaku, maka pelaku dapat langsung memberikan tindakan berupa hukuman dan sebagainya, namun tidak berbeda dengan *Threats* bahwa akan ada dampak yang ditimbulkan ataupun sisi negatif dari penggunaan opsi ini, yaitu adanya kebencian ataupun perlawanan yang akan diberikan dari si pihak lawan (Pruitt & Carnevale, 1993, hal. 32).

Para pemberontak muslim di wilayah selatan terutama BRN, sudah sejak lama menggunakan taktik *harassment* ini sebagai upaya untuk mendapatkan tujuannya yaitu perolehan hak otonomi khusus atau bahkan pemisahan dari negara Thailand. Beberapa metode yang digunakan yaitu mulai dari tindak kekerasan seperti pemboman, penembakan, serta tabrak lari. Mereka menargetkan sekolah, kantor pemerintahan yang ada di wilayah selatan, dan badan yang berhubungan dengan negara, bahkan mereka tidak segan menargetkan atau membunuh sesama warga muslim tetapi yang mereka nilai sebagai informan pemerintah, atau yang pro dengan pemerintah. Taktik-taktik kekerasan masih menjadi metode yang paling populer digunakan oleh pemberontak untuk menekan pemerintah dalam usaha mencapai tujuan.

Pada 13 Februari 2013, separatis Thailand Selatan menembak mati enam warga diantaranya satu anak masih di bawah umur. Warga setempat yang menjadi korban ini berasal dari komunitas Budha. Para kelompok pemberontak ini

mengeluarkan tembakan dengan cara membabi buta, tidak hanya itu pelaku meninggalkan sebuah catatan di lokasi kejadian yang menyebutkan bahwa serangan yang dilakukan merupakan balas dendam atas kematian rekan-rekannya (News, 2013). Spiral konflik ini sudah terjadi sejak lama dengan pola balas-membalas.

Pada 5 April 2013, pemberontak selatan Thailand membunuh seorang wakil gubernur provinsi Yala Isra Thongthawat dan beberapa pejabat tinggi lainnya ketika mobil yang dikendarainya meledak. Peristiwa itu terjadi setelah Pemerintah Thailand menggelar dialog pertamanya dengan militan BRN di Februari 2013. Pihak keamanan memastikan BRN yang bertanggung jawab atas insiden ini (Akbar, 2013).

Pada 14 Maret 2014, Seorang guru berusia 46 tahun ditembak mati dan dibakar oleh kelompok pemberontak. Penembakan guru tersebut menambah panjang daftar pembunuhan pekerja pendidikan yang selama ini menjadi target pemberontak karena dianggap sebagai mata-mata atau kaki tangan pemerintah (Detik News, 2014). Kemudian di tanggal 30 Maret 2014, terjadi ledakan bom diacara lomba memancing di wilayah Narathiwat yang menewaskan tiga polisi dan 17 orang lain luka-luka (VOA Indonesia, 2014).

Pada 10 Juli 2015, terjadi serangkaian insiden di beberapa distrik di Thailand Selatan. Salah satunya ledakan bom yang dipasang di sepeda motor distrik Sadao, Provinsi Songkhla. Tiga orang tewas karena insiden tersebut. Kemudian, Tiga ledakan bom lainnya juga terjadi di Provinsi Narathiwat tepatnya di bar karaoke di distrik Sugnai Kolok, polanya hampir sama yaitu dengan

meletakan bom di sepeda motor. Tidak hanya ledakan, terjadi juga insiden pembakaran toko-toko yang menewaskan tiga orang (Detik News, 2015).

Pada 22 Mei 2017, terjadi ledakan bom di Rumah Sakit Phramongkutklo di Bangkok Thailand yang terkenal banyak kalangan perwira militer pensiunan disana. Akibat kejadian ini kurang lebih 24 orang mengalami luka-luka. Insiden ini terjadi bertepatan dengan peringatan tiga tahun kudeta militer 2014 silam (Suastha, 2017). Pada 22 Januari 2018, terjadi ledakan bom motor di pasar yang menewaskan 3 orang dan 18 orang luka-luka (Samosir, 2018).

Beberapa tindak kekerasan yang dilakukan oleh pemberontak BRN dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 3. 1 Sikap Harrassment yang dilakukan BRN (Barisan Revolusi Nasional)

No.	Tahun	Insiden
1.	2013	- Pada 13 Februari 2013, separatis Thailand Selatan menembak mati enam warga diantaranya satu anak masih di bawah umur. Warga setempat yang menjadi korban ini berasal dari komunitas Budha. - Pada 5 April 2013, pemberontak selatan Thailand membunuh seorang wakil gubernur provisi Yala Isra Thongthawat dan beberapa pejabat tinggi lainnya ketika mobil yang dikendarainya meledak.
2.	2014	-Pada 14 Maret 2014, Seorang guru berusia 46 tahun ditembak mati dan dibakar oleh kelompok pemberontak. Penembakan guru tersebut menambah panjang daftar pembunuhan pekerja pendidikan yang selama ini menjadi target pemeberontak karena dianggap sebagai mata-mata atau kaki tangan pemerintah.
3.	2015	-7 orang tewas akibat penembakan dan ledakan bom, serta disertai pembakaran didistrik Narathiwat dan Songkhla (Detik News).
4.	2017	-Terjadi ledakan bom di rumah sakit militer king mongkut.
5.	2018	-Bom motor meledak di pasar Thailand, 3 orang tewas dan 18 orang luka-luka

Sumber: diolah dari beberapa sumber, sebagaimana dikutip pada BBC News, VOA Indonesia, CNN Indonesia, dan Okezone.

Dari rincian tabel di atas, itu hanya sedikit dari beberapa insiden kekerasan yang dilakukan pemberontak. Karena dalam satu tahun hampir setiap bulan ada

insiden kekerasan walaupun sifatnya fluktuatif. Serangkaian yang terjadi bertujuan untuk menarik perhatian internasional terhadap konflik yang sudah lama terjadi, berharap hal tersebut dapat menarik perhatian pihak asing untuk ikut campur dalam upaya menemukan solusi.

Upaya yang dilakukan BRN melalui strategi *Contending* dengan bentuk *Harassment* dapat dikatakan termasuk ke dalam strategi serta bentuk *Harassment* yang dijelaskan oleh Dean G. Pruitt, karena kekerasan-kekeraan yang dilakukan oleh BRN memiliki tujuan untuk menekan pemerintah agar mau membuat konsesi terutama berhubungan dengan pemberian hak otonomi khusus.

Kekerasan-kekeraan ini suatu bentuk ancaman nyata yang diberikan BRN kepada militer Thailand. Maka upaya tersebut sesuai dengan apa yang telah disebutkan dalam buku *Strategies and Tactic in Negotiation* oleh Dean G. Pruitt, dimana dalam buku tersebut menyebutkan bahwa *Harassment* sendiri akan lebih bersifat nyata dan akan membuat pihak lawan lebih menuruti kemauan dari si pelaku *Harassment*. Sehingga jika melihat insiden kekerasan yang kronis dan berkepanjangan ini merupakan suatu sikap maupun upaya yang memang benar-benar dilakukan, karena hal tersebut ditunjukkan untuk membuat militer Thailand mengikuti keinginan BRN dalam mencapai proses perdamaian (Pruitt & Carnevale, 1993, hal. 32).

3.1.3 Upaya BRN Melalui Bentuk Taktik *Positional commitments* (Komitmen posisional)

Positional commitments, komitmen posisional dapat diartikan sebagai pernyataan yang diberikan berupa tawaran, di mana biasanya pernyataan yang

diberikan tidak terlepas dari beberapa ancaman yang diberikan. Hal tersebut bertujuan untuk menghentikan negosiasi jika pihak lain tidak menerima tawaran ini, dengan kata lain tawaran yang diberikan tidak dapat ditawarkan kembali. *Positional commitments* lebih efektif apabila dalam mencapai suatu kesepakatan akan terjadi kegagalan, oleh karena itu cara ini hanya berguna sedikit dalam mencapai suatu kepentingan, karena kegagalan yang nantinya akan mencapai kesepakatan belum tentu sepenuhnya merugikan pihak lawan, dan juga *Positional commitments*, dalam penerapannya harus dapat dipercaya oleh pihak lawan, seperti contoh bahwa suatu penjual mobil dengan harga 10.500 dolar dapat menekan pembeli dengan harga tersebut, di mana harga tersebut sudah harga mati dan tidak dapat ditawarkan lagi (Pruitt & Carnevale, 1993, hal. 32-33).

Setelah upaya dialog damai 2013 di Kuala Lumpur antara BRN dan pemerintah Thailand gagal karena krisis politik termasuk kudeta terhadap pemerintahan Yingluck Shinawatra, ditambah lima tuntutan yang diajukan BRN ditolak pemerintah Thailand, membuat BRN merasa enggan untuk melakukan dialog kembali, hal tersebut di dasarkan kerana tidak adanya perkembangan yang signifikan terhadap upaya damai (McDermott, 2014, pp. 23-24).

Tahun 2015 di bawah pemerintahan jenderal Prayuth Chan-ocha, upaya dilalog damai antara pemerintah Thailand dan pihak pemberontak mulai di bangkitkan kembali, namun dengan aktor yang berbeda yaitu pihak militer pemerintah dengan MARA pattani sebuah organisasi yang memayungi beberapa kelompok pemberontak didalamnya seperti PULO, GMIP termasuk juga BRN. Upaya dialog pertama diadakan pada Juni 2015. Namun pada Oktober 2015, BRN

mengeluarkan pernyataan melalui sosial media bahwa “*BRN belum menyangkal dalam proses perdamaian dan menegaskan bahwa BRN tidak terlibat dalam MARA pattani*”. Menurut surat pernyataan tersebut, BRN menyangkal representasi dari mereka yang mengaku sebagai BRN dalam kelompok MARA patani. Mereka menuntut tahap dialog yang berbasis internasional, agenda, dan pihak asing yang terlibat (International Crisis Group, 2020).

Proses dialog antara MARA patani dan militer pemerintah pada kenyataannya menemui jalan buntu, karena MARA patani dinilai tidak memiliki kekuatan untuk mengontrol militan yang ada dilapangan sehingga kekerasan masih saja terjadi. Banyak pengamat politik yang berpendapat bahwa konflik ini ada di antara pihak BRN dan pemerintah, kekerasan akan terus terjadi jika tidak ada keterlibatan BRN dalam perundingan.

Melihat situasi ini, BRN kembali menerapkan taktik yaitu dengan opsi tawaran akan bersedia melakukan perundingan dengan pemerintah Thailand dengan syarat harus melibatkan pihak ketiga atau pengamat asing dalam proses dialog. Jika tuntutan tidak dipenuhi, BRN tidak akan kembali ke meja perundingan dan akan tetap menggunakan cara lama yaitu kekerasan (Group, Crisis Group, 2020). Upaya yang dilakukan BRN dalam menekan pemerintah Thailand melalui strategi *Contending* dengan taktik *Positional Commitments* dikatakan sesuai dengan yang dilakukan BRN terhadap pemerintah Thailand. Hal ini dilihat dari upaya yang dilakukan BRN dalam mencapai suatu kepentingan, yakni berupa diberikannya tawaran yang bersifat memaksa. Dengan tawaran yang bersifat memaksa di mana apa yang menjadi suatu penawaran tidak bisa ditawar

kembali, maka suatu perjanjian maupun negosiasi akan menjadi gagal karena kedua belah pihak tidak mengambil ataupun menerima tawaran tersebut.

Biasanya pernyataan ataupun tawaran yang diberikan tersebut tidak terlepas dari beberapa ancaman yang diberikan ataupun tawaran yang tidak bisa terhindar yang mana sifatnya memaksa ataupun tidak dapat ditawar kembali. Bahwa BRN akan melakukan tawaran kepada pihak pemerintah Thailand yaitu menawarkan kesediaanya dalam meja perundingan jika pihak pemerintah Thailand mau memenuhi tuntutan yaitu melibatkan pihak asing dalam setiap proses dialog (Carnevale D. G., 1993, pp. 32-33).

3.2 Strategi *Problem solving* oleh BRN (Barisan Revolusi Nasional)

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh BRN melalui strategi *Contending* telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, di mana dalam mencapai negosiasi ataupun kepentingan yang dituju akan mengalami tingkat kegagalan yang cukup tinggi dengan menerapkan strategi tersebut. Untuk itu BRN perlu melakukan strategi lain dalam mendorong proses perdamaian yaitu dengan menggunakan strategi *Problem Solving*.

Strategi *problem solving* merupakan strategi yang digunakan untuk mencapai suatu kepentingan atau dapat dikatakan strategi dalam mencapai *Win-win Solution*, yakni masing-masing pihak merasa menang atas apa yang mereka inginkan. Dalam strategi *problem solving*, pemecahan masalah dapat dilakukan dengan kerja sama sehingga pemecahan masalahpun yang ada dari kedua belah pihak dapat diterima masing-masing secara hukum. Dalam strategi *problem solving* ada tiga bentuk yang digunakan untuk dapat mencapai *Win-win Solution*

yakni *Expanding the pie*, *Exchanging Concession*, dan *Solving Underlying Concerns*, di mana semua bentuk strategi dalam *problem solving* tersebut bertujuan untuk dapat menemukan permasalahan dan dapat diselesaikan secara bersama. Namun pada kasus ini BRN hanya melakukan satu taktik yaitu *Exchanging Consession* (Pruitt & Carnevale, 1993, hal. 36).

3.2.1 Upaya BRN Melalui Bentuk Taktik *Exchanging Concessions*

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, *Exchanging Concessions* merupakan cara yang bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dan mencapai *Win-win Solution*, yaitu dengan cara bertukar konsesi mengenai berbagai masalah yang ada. Di mana masing-masing pihak dapat menghasilkan isu yang berbeda yang menjadi prioritas.

Strategi melalui bentuk *Exchanging Conssesions* yang dilakukan oleh BRN tersebut dapat dilihat dengan upaya BRN yang mau membuka diri dan bersedia melakukan proses dialog damai untuk pertama kalinya di Kuala Lumpur 2013. Ini menjadi langkah yang baik setelah sebelumnya BRN selalu menggunakan cara-cara kekerasan untuk menekan militer demi tujuannya. Dalam proses dialog damai tersebut kedua belah pihak harus mulai membangun rasa saling percaya. Setelah tiga kali pertemuan, akhirnya BRN dan militer Thailand menyepakati untuk melakukan gencatan senjata selama bulan Ramadhan atas inisitif Malaysia.

Dari pihak militer, mereka menuntut pihak BRN untuk tidak melakukan kekerasan selama periode "*Ramadhan Peace*". Hal tersebut ditanggapi pihak BRN dengan positif, pihak BRN berjanji tidak hanya akan mengurangi kekerasan

bahkan akan berhenti melakukan kekerasan selama bulan Ramadhan. Tetapi tentunya dengan syarat, militer harus ditarik kembali ke kamp dan selama periode tersebut tentara tidak boleh lagi berkeliaran ditengah-tengah masyarakat. Awalnya kedua belah pihak sepakat, hal ini menjadi awal yang baik untuk kedua belah pihak saling menunjukkan komitemnya. Walaupun pada akhirnya kesepakatan itu di langgar oleh militer, di mana dalam minggu pertama militer sudah menembak mati beberapa pemuda aktivis perjuangan.

Upaya yang dilakukan oleh BRN melalui strategi *Problem solving* dengan bentuk *Exchanging Consession* dapat dikatakan sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Dean G. Pruitt karena, pihak BRN telah melakukan pertukaran konsesi kepada BRN dalam mencapai proses perdamaian. Dan pihak BRN juga memprioritaskan tuntutan pihak lawan, dengan berjanji tidak akan melakukan kekerasan selama periode *Ramadhan Peace* tersebut sesuai apa yang militer Thailand inginkan.

Tabel 3. 2 Aplikasi Teori Strategies and Tactic in Negotiation dalam bentuk Contending dan Problem Solving oleh BRN

Strategi*	Taktik*	Penjelasan Taktik	Upaya yang dilakukan BRN
<i>Contending</i>	<i>Threats (Ancaman)</i>	<i>Threats (Ancaman)</i> merupakan suatu langkah atau upaya yang dilakukan dalam mencapai suatu kepentingan yang ingin dituju, dengan memberikan ancaman ataupun menghukum pihak lawan apabila tuntutan yang diinginkan tidak tercapai, dan dapat mendorong pihak lawan ke arah negosiasi	-BRN akan tetap melakukan tindakan kekerasan sebagai bentuk perjuangan, selama tuntutannya tidak dipenuhi oleh Militer Thailand. -BRN mengancam tidak mau kembali ke meja perundingan selama tuntutnya tidak terpenuhi.
	<i>Harassment atau pelecehan</i>	<i>Harassment</i> atau pelecehan merupakan tindakan yang dapat dilakukan kepada pihak lawan dengan memberikan sanksi ancaman yang melibatkan hukuman,	-BRN masih gencar melakukan kekerasan dengan metode yang beragam, seperti pemboman, penembakan,

Strategi*	Taktik*	Penjelasan Taktik	Upaya yang dilakukan BRN
		Harassment lebih bersifat nyata di bandingkan dengan opsi <i>Threats</i> sebelumnya, karena dampak yang ditimbulkan dari <i>Harassment</i> sendiri akan lebih bersifat nyata dan akan membuat pihak lawan lebih menuruti kemauan dari si pelaku.	pembakaran fasilitas-fasilitas publik. -
	Positional commitments, komitmen posisional	<i>Positional commitments</i> , komitmen posisional dapat diartikan sebagai pernyataan yang diberikan berupa tawaran yang memaksa, dimana biasanya pernyataan yang diberikan tidak terlepas dari beberapa ancaman yang diberikan, hal tersebut bertujuan untuk menghentikan negosiasi jika pihak lain tidak menerima tawaran ini.	-BRN memberikan tawaran kesediannya untuk kembali ke meja perundingan, namun dengan syarat militer Thailand memenuhi tuntutan. Itu udah menjadi posisi komitmen yang dipegang BRN
Problem Solving	Exchanging concessions	- <i>Exchanging concessions</i> merupakan cara yang bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dan mencapai <i>Win-win Solution</i> , yaitu dengan cara bertukar konsesi mengenai berbagai masalah yang ada. Di mana masing-masing pihak dapat menghasilkan isu yang berbeda yang menjadi prioritas rendah terhadap dirinya dan menjadikan isu tersebut prioritas tinggi terhadap pihak lain	-BRN bersedia melakukan proses dialog damai dengan militer Thailand. Keduabelah pihak saling bertukar konsesi. Walaupun pada akhirnya kesepakatan yang telah dibuat gagal.

*) dalam *Contending* dan *Problem Solving* menurut Pruitt & Carnevale
 Sumber: Diolah dari (Pruitt & Carnevale, 1993, hal. 36-40)

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Melalui uraian pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa skripsi ini bicara mengenai strategi dan taktik yang dilakukan oleh pemerintah Thailand dan BRN (Barisan Revolusi Nasional) dalam upaya mengurangi kekerasan dan mendorong proses perdamaian diantara kedua belah pihak yang bertikai sudah hampir puluhan tahun, dilihat dari penggunaan *Strategy and Tactic Negotiation*. Karena konflik bersenjata ini sudah lama terjadi dan merugikan kedua belah pihak, tentu perlu adanya upaya-upaya yang harus dilakukan demi tercapainya perdamaian. Di mana dalam hal ini kedua belah pihak memiliki andil dalam proses perdamaian karena mereka memiliki pengaruh masing-masing. Rumusan masalah yang coba dijawab disini adalah bagaimana strategi dan taktik negosiasi yang dilakukan oleh pemerintah Thailand dan BRN dalam upaya mengurangi kekerasan tahun 2013-2018. Di mana kurun waktu tersebut kedua belah pihak mulai saling membuka diri untuk melakukan dialog damai.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh kedua belah pihak antara pemerintah Thailand dan BRN (Barisan Revolusi Nasional) dalam upaya mengurangi kekerasan melalui *Strategy and Tactic Negotiation*, terdiri dari dua macam strategi yaitu *Strategy Contending* dan *Problem Solving*.

Strategi pertama yang digunakan oleh pihak militer Thailand dalam upaya mengurangi kekerasan di wilayah Selatan yaitu menggunakan *Strategy Contending*. Di mana *Strategy Contending* itu sendiri merupakan segala macam usaha maupun upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik menurut kemauan seseorang tanpa memperdulikan kepentingan pihak lain. Dalam Strategi *Contending* tersebut, ada beberapa bentuk upaya yang dilakukan Militer Thailand yaitu, *Threats* yakni dengan menggunakan ancaman, *Harrasment* lebih kepada pelecehan ataupun ancaman dengan memberikan sanksi yang nyata yang sudah dilakukan oleh Militer Thailand. Kemudian *Positional commitments* merupakan komitmen posisi yang mana hal tersebut merupakan komitmen yang tidak dapat ditawarkan kembali.

Adapun upaya yang dilakukan Militer Thailand melalui strategi ini, Militer Thailand memberikan ancaman kepada BRN dengan pemberlakuan undang-undang darurat militer, menggunakan instrument militer, melakukan kekerasan terhadap para pemberontak bahkan membunuh warga di luar hukum.

Bentuk upaya kedua yang dapat dilihat melalui *Strategy and Tactic in Negotiations* yang dilakukan Militer Thailand dalam upaya mengurangi kekerasan tersebut yaitu dengan menggunakan strategi *Problem solving*. Dimana strategi ini lebih berfokus kepada pencapaian kepentingan bersama, yakni *Win-win Solution*, biasanya permasalahan yang terjadi dilakukan secara bersama-sama sehingga kedua belah pihak akan merasakan kepentingan bersama yang dituju.

Bentuk dari *Problem solving* tersebut, yaitu *Exchanging concessions* merupakan cara yang bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dan

mencapai kepentingan bersama tersebut. Yakni dengan cara bertukar konsesi mengenai berbagai masalah yang ada serta memberikan prioritas yang tinggi kepada pihak lawan namun menerapkan prioritas rendah kepada diri sendiri. Dimana jika melihat langkah yang sudah dilakukan militer Thailand dalam upaya mengurangi kekerasan di wilayah Selatan, militer Thailand untuk pertama kali dalam sejarah membuka dialog damai dengan BRN yang difasilitasi oleh Malaysia. Dalam dialog damai tersebut kedua belah pihak menghasilkan kesepakatan yaitu *Ramadhan peace*, dimana kedua belah pihak saling sepakat untuk melakukan gencatan senjata selama bulan Ramadhan, hal tersebut menjadi langkah awal yang baik untuk saling membangun rasa percaya. Walaupun pada akhirnya kesepakatan itu gagal karena

Dengan upaya yang lebih banyak berfokus pada strategi *Contending*, tentu saja negosiasi dapat dikatakan tidak akan berhasil, karena seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwasannya strategi tersebut hanya akan menguntungkan salah satu pihak saja dan Militer Thailand tidak sepenuhnya melakukan strategi *Problem solving* dalam mencapai *Win-win Solution* terhadap upaya mengurangi kekerasan di Selatan.

Kemudian jika dilihat dari strategi yang dilakukan oleh BRN, mereka juga melakukan dua strategi yaitu *Contending* dan *Problem Solving* dalam upaya mengurangi kekerasan dan tentunya untuk menekan militer Thailand agar segera menemukan cara untuk mengakhiri konflik yang sudah lama terjadi.

Strategi pertama yang digunakan oleh pihak BRN dalam upaya menekan pihak militer di wilayah selatan yaitu menggunakan *Strategy Contending*. Seperti

yang sudah dijelaskan sebelumnya, dimana *Strategy Contending* itu sendiri merupakan segala macam usaha maupun upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik menurut kemauan seseorang tanpa memperdulikan kepentingan pihak lain. Dalam Strategi *Contending* tersebut, ada beberapa bentuk upaya yang dilakukan Militer Thailand yaitu, *Threats* yakni dengan menggunakan ancaman, *Harrasment* lebih kepada pelecehan ataupun ancaman dengan memberikan sanksi yang nyata yang sudah dilakukan oleh Militer Thailand. Kemudian *Positional commitments* merupakan komitmen posisi yang mana hal tersebut merupakan komitmen yang tidak dapat ditawarkan kembali.

Adapun upaya yang dilakukan BRN melalui strategi ini, BRN memberikan ancaman kepada militer Thailand dengan mengancam akan terus melakukan kekerasan sebagai bentuk perlawanan mereka, melakukan serangkaian kekerasan dengan cara membunuh militer Thailand, membunuh warga sipil terutama warga Budha yang selama ini menjadi target operasi mereka. Tidak hanya itu BRN melakukan serangkaian serangan seperti pemboman di beberapa distrik terutama pada fasilitas-fasilitas publik.

Bentuk upaya kedua yang dapat dilihat melalui *Strategy and Tactic in Negotiations* yang dilakukan BRN dalam upaya mengurangi kekerasan tersebut yaitu dengan menggunakan strategi *Problem solving*. Dimana strategi ini lebih berfokus kepada pencapaian kepentingan bersama, yakni *Win-win Solution*, biasanya permasalahan yang terjadi dilakukan secara bersama-sama sehingga kedua belah pihak akan merasakan kepentingan bersama yang dituju.

Bentuk dari *Problem solving* tersebut, yaitu *Exchanging concessions* merupakan cara yang bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dan mencapai kepentingan bersama tersebut. Dalam taktik ini BRN mulai membuka diri untuk bersedia melakukan dialog damai setelah sebelum-sebelumnya mereka menutup diri dari publik. Dari beberapa upaya dialog damai menghasilkan kesepakatan seperti *Ramadhan Peace* dan *Safety Zone* (zona aman di beberapa wilayah selatan) walaupun pada *Safety Zone* ini posisi BRN berada di bawah naungan MARA Pattani sebuah organisasi yang memayungi beberapa kelompok pemabrontak termasuk BRN. Hal ini menjadi langkah yang baik, walaupun beberapa langkah tersebut sampai saat ini belum menemukan solusi untuk mengakhiri konflik di Selatan.

Oleh karena itu, jika di lihat dari upaya kedua belah pihak yang lebih banyak berfokus pada strategi *Contending*, tentu saja negosiasi dapat dikatakan tidak akan berhasil, karna seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwasannya strategi tersebut hanya akan menguntungkan salah satu pihak saja dan kedua belah pihak antara Militer Thailand dan BRN tidak sepenuhnya melakukan strategi *Problem solving* dalam mencapai mencapai *Win-win Solution* terhadap upaya proses damai. Sehingga penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, upaya kedua belah pihak belum bisa dikatakan berhasil dalam mendorong tercapainya proses damai untuk mengakhiri konflik pada tahun 2013-2018.

4.2 Rekomendasi Penelitian

Dari penelitian ini masih terdapat beberapa keterbatasan yang berkaitan dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Thailand dan BRN dalam

upaya proses perdamaian. dimana upaya tersebut hanya berfokus kepada dua macam strategi saja yang dilakukan yaitu *Contending* dan *Problem solving*, maka dari keterbatasan tersebut ada potensi untuk dapat merekomendasikan penelitian yang lebih lanjut pada aspek *Strategy and Tactic in negotiations* lainnya. Misalnya dengan mencari upaya lain yang dilakukan kedua belah pihak antara pemerintah Thailand dan BRN dilihat dari bentuk *Strategy and Tactic in negotiations* lainnya. Sebagai salah satu kasus konflik berkepanjangan di Thailand Selatan, penulis merekomendasikan penelitian lebih lanjut mengenai perkembangan konflik BRN dan pemerintah di Thailand Selatan, karena hingga saat ini konflik secara fisik masih terjadi dan beberapa upaya dialog selalu menemui kegagalan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abuza, Z. (2011). *The Ongoing Insurgency in Southern Thailand: Trends in Violence, Counter Counterinsurgency Operations, and the Impact of National Politics*. CreateSpace Independent Publishing Platform.
- Agestu, I. (2015, 7 4). *Militer Thailand Diduga Membunuh Empat Warga Sipil di Selatan*. Retrieved from CNN Web site:
<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20150407194044-106-44904/militer-thailand-diduga-membunuh-empat-warga-sipil-di-selatan>
- Ahram. (2016). *Thailand Akan Lanjutkan Pembicaraan Damai Dengan Pejuang Muslim Pattani*. VOA-Islam.
- Akbar, A. (2013, 4 5). *Wakil Gubernur Tewas Terkena Serangan Bom*. Retrieved from Okezone Web site:
<https://news.okezone.com/read/2013/04/05/411/787088/wakil-gubernur-tewas-terkena-serangan-bom>
- Amijoyo, H. A. (2019). kebijakan luar negeri Najib Razak terhadap konsolidasi Thailand dan gerakan aliansi separatisme etnis melayu di Thailand Selatan tahun 2013-2016. *jurnal hubungan internasional*, 108-109.
- Aurel Croissant, C. T. (n.d.). Culture, Identity and Conflict in Asia and Southeast Asia. *International Culture Dialogue* (pp. 23-24). Jerman: bertelsmann stiftung.
- Bangkok post. (2013). *Ramadan Peace Initiative 2013*. Bangkok: Bangkokpost.com.
- Bangkok, A. F.-P. (2013, 8 8). *Rebels threaten to quit Thai peace talks*. Retrieved from South China Morning Post:
<https://www.scmp.com/news/asia/article/1295259/rebels-threaten-quit-thai-peace-talks>
- BBC. (2014). *Kudeta Militer di Thailand*. BBC.
- BBC. (2015, Maret 31). Retrieved from BBC NEWS Indonesia:
https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/03/150331_thai_hukumdarurat
- BBC. (2017). *Eksklusif: Pemberontak Muslim utama Thailand Selatan Siap berunding*. BBC.
- Carnevale, D. G. (1993). *Negotiation in Social Conflict*. Open University Press.
- Carnevale, P. (2003, November). *Negotiation and Mediation*. Retrieved 8 19, 2019, from ResearchGate:

https://www.researchgate.net/publication/234837390_Negotiation_and_Mediation

Chalermripinyorat, R. (2018). *Making Thailand's southern peace dialogue meaningful*. newmandala.

Dean G Pruitt, Peter J. Carnevale. (1993). *Negotiation In Social Conflict*. California: Book/Cole Publishing Company Grove.

Dean G. Pruitt, P. J. (1993). *Negotiation in Social Conflict*. Open University Press.

Detik News. (2014, 3 14). *Penembakan bu guru tersebut menambah panjang daftar pembunuhan pekerja pendidikan*. Retrieved from Detik News Web site: <https://news.detik.com/internasional/d-2525934/mengerikan-bu-guru-ditembak-mati-dan-dibakar-di-thailand-selatan>

Detik News. (2015, 7 10). Retrieved from Detik News Web site: <https://news.detik.com/internasional/d-2966503/7-orang-tewas-akibat-ledakan-bom-dan-penembakan-di-thailand>

Group, I. C. (2016). *Southern Thailand's Peace Dialogue: No Traction*. Crisisgroip.org.

Helbardt, S. (2015). *Deciphering Southern Thailand's Violence, Organization and Insurgent Practices of BRN-Coordinate*. Singapore : ISEAS, Yusof Ishak Institute.

Human Right Watch. (2014, mei 20). *Thailand: Revoke Martial Law Undermining Rights*. Retrieved from Human Right Watch Web Site: <https://www.hrw.org/news/2014/05/20/thailand-revoke-martial-law-undermining-rights>

Ibnihusen, F. (2016). *Declaration on the Thai State's Conduct: The Continuation of Human Rights Violations, Prejudices and Discrimination towards the People of Patani*. Turanisia.com.

International Crisis Group. (2020). *Southern Thailand's Peace Dialogue: Giving Substance to Form*. Bangkok.

Ismail, M. A. (2018). *Thailand Announces 'Safety Zone' Agreement With Rebels in Deep South*. Pattani and Narathiwat,; BenarNews.

Jitpiromsri, S. (2013). *A Meaningful Peace: Ramadan Ceasefire Assessment*. Bangkok: DeepSouthWatch.

Lehmann, A. (2013, 3 26). *Pemerintah Thailand Siap Berunding Dengan Separatis*. Retrieved from DW Web site: <https://www.dw.com/id/pemerintah-thailand-siap-berunding-dengan-separatis/a-16699781>

- Maslen, S. C. (2014). *The war report: Armed conflict in 2013*. Inggris: OUP Oxford.
- Mayberry, K. (2013). *Thai peace talks in Malyasia face uphill task*. Aljazeera.
- McDermott, G. (2014). The 2013 Kuala Lumpur Talks: A Step Forward for Southern Thailand. 23.
- Melvin, N. J. (2007). *Conflict in Southern Thailand, islamism, violence and the state in the patani insurgency*. sweden: Stockholm International Peace Research Institute .
- Middle East Institute . (2017). *Southern Thailand's Malay Muslim Freedom Fighters*. Mei.edu.
- News, B. (2013, 5 2). *Enam warga tewas dalam serangan di Thailand*. Retrieved from BBC News Web site:
https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2013/05/130502_thailand_kekerasan
- Pitsuwan, S. (1989). *Islam di Muangthai: Nasionalisme Melayu Masyarakat Pattani*. Jakarta: LP3ES.
- Post, B. (2013). *BRN rebels blamed for Yala school bomb*. bangkok: Bangkok post.
- Post, B. (2013, Juli 31). *Five injured in four attacks in Yala*. bangkok: bangkok post.
- Pruitt, D. G., & Carnevale, P. J. (1993). *Negotiation In Social Conflict*. California: Book/Cole Publishing Company Grove.
- Puspaningtyas, L. (2015, Maret 31). Retrieved from Republika.co.id:
<https://republika.co.id/berita/nm2pc0/pm-thailand-minta-izin-raja-cabut-darurat-militer>
- Samosir, H. A. (2018, 1 22). Retrieved from CNN Indonesia Web site:
<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20180122104125-106-270620/bom-di-pasar-thailand-tiga-orang-tewas>
- Srisompob Jitpiromsri, N. W. (2019). Special Issue: Quagmire of Violence in Thailand's Southern Borderlands Chapter 1: Introduction. *Asian Affairs: An American Review*, 47.
- Suastha, R. D. (2017, 5 10). Retrieved from CNN Indonesia Web site: Riva Dessthania Suastha Baca artikel CNN Indonesia "Bom Meledak di Rumah Sakit Thailand, Puluhan Terluka" selengkapnya di sini:
<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20170522141503-106-216412/bom-meledak-di-rumah-sakit-thailand-puluhan-terluka>. Downl
- Timberman, D. G. (n.d.). *Violent Extremism and Insurgency Southern Thailand*. Washington : United States Agency for International .

VOA Indonesia. (2014, 4 26). Retrieved from VOA Indonesia Web site:
<https://www.voaindonesia.com/a/serangan-bom-di-pantai-thailand-selatan-tewaskan-3-polisi/1901388.html>

Wulandari, C. (2018). Sekuritisasi Isu Separatisme Patani, Thailand Selatan. *Journal of International Relations*, 48.

